



LAPORAN KINERJA

Kanwil DJP Jawa Timur III



2024

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024 menjadi dasar bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yang berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian Visi Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III berfungsi sebagai alat ukur sekaligus alat penilai kinerja secara kuantitatif dan kualitatif serta perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan harus bersifat transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. LAKIN juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah implementasi pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan DirekturJenderal Pajak Tahun 2024. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selalu berkomitmen untuk terus bekerja keras agar dapat mencapai seluruh target yang diamanahkan, meningkatkan hubungan kerja sama dengan *stakeholder*, dan memberikan pelayanan yang *excellent* bagi Wajib Pajak. LAKIN ini disusun sebagai laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun serta alat evaluasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam mempersembahkan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang.

Malang, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur III,



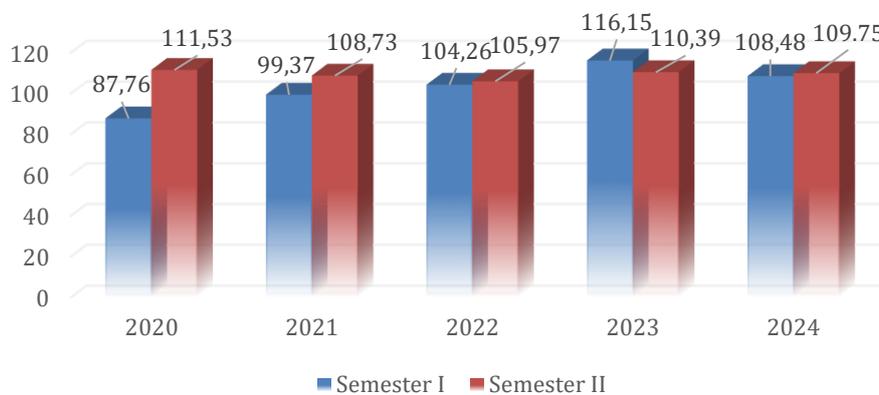
Ditandatangani secara elektronik
Tri Bowo



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah implementasi pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun 2024. Perlu disampaikan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selama 5 tahun berturut-turut selalu di atas 100,00 (seratus) sebagaimana diagram sebagai berikut:

GRAFIK NILAI KINERJA ORGANISASI



Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kanwil DJP Jawa Timur III berhasil mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi kerja terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun lainnya. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III juga berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan-penghargaan tersebut diraih oleh unit kerja maupun individu-individu di Kanwil DJP Jawa Timur III. Adapun daftar penghargaan tersebut tercantum sebagaimana tabel berikut:

1. Daftar penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

No	Kategori	Pemberi	Penerima	Tahun
1	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak	Menteri Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2020
2	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak	Menteri Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2020
3	Satker Berkinerja Terbaik III Kategori Pagu Besar di atas 20 Milyar atas IKPA (Periode Triwuan IV TA 2020)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang	Kanwil DJP Jawa Timur III	2020

4	Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak	Menteri Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2021
5	Kinerja Melebihi Target Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan WP Badan dan OP	Menteri Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2021
6	Juara II Kategori Penegakan Integritas dan Nilai Etika Pegawai	Direktur Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2022
7	Kanwil Dengan LPP Tukin Terbaik Pertama TA 2022	Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2022
8	Satker Dengan Capaian IKU PKPA di atas Target TA 2022	Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2022
9	Duta Transformasi Terbaik Peringkat Kelima Tingkat Kemenkeu	Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
10	Kinerja Penerimaan Pajak Terbaik Pertama Tingkat Nasional - Klaster Kanwil	Direktur Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
11	Kinerja Kegiatan Pengamatan Terbaik Kedua Tingkat Nasional - Klaster Kanwil	Direktur Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
12	Peringkat I Kanwil DJP dengan Jumlah DSPT Rekomendasi Terbanyak dan Penyelesaian DSPT Kolaboratif Terbanyak	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan, Direktorat Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
13	Kanwil DJP dengan Kegiatan Kehumasan Terbanyak	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan, Direktorat Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
14	Pengendali Pemeriksaan WP Grup Terbaik Nasional	Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak	Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
15	Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)	Kementerian Keuangan	Kanwil DJP Jawa Timur III	2024
16	Peringkat II Satker Terbaik atas IKPA Pagu Rp 5 s.d. 20 Milyar Triwulan I TA 2024	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang	Kanwil DJP Jawa Timur III	2024

2. Daftar penghargaan yang diperoleh Pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

No	Kategori	Pemberi	Penerima	Tahun
1	Finalis Top 10 Lomba Stand Up Comedy dalam Rangka HORI ke-74	Kementerian Keuangan	Anum Intan Maulidi	2020
2	Kinerja Pemeriksaan Terbaik Klaster UP2 Kanwil - Subkategori Supervisor	Direktur Jenderal Pajak	Moekti Widodo	2023
3	Duta Transformasi Terbaik V Kelima Tingkat Kemenkeu & Duta Transformasi Terbaik I Tingkat DJP	Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak	Tim Duta Transformasi Kanwil DJP Jawa Timur III	2023
4	Juara 3 Lomba Infografis pada DJP Got Talent 2024	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan, Direktorat Jenderal Pajak	Faris Aulia Rahman	2024

Selain meraih berbagai penghargaan tersebut di atas, Kanwil DJP Jawa Timur III juga berhasil mencapai target kinerja tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Tahun 2024. Rincian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yaitu *Stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *Learning & Growth perspective*. Berikut adalah Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,06%
		Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100,00%	108,09%
<i>Customer Perspective</i>				
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%

		Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,11%
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%
Internal Process Perspective				
4	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif	Persentase Perubahan Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	88,80%
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,33%
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	120,00%
6	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%	120,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	100,00%	100,82%
7	Penegakan Hukum yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	115,17%
8	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal	Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu	86,50%	99,19%
		Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	63,00%	91,27%
9	Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	116,50%
		Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55,00%	83,40%
Learning & Growth Perspective				
10		Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00%	114,93%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	114,14%

	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	98,01%
11	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00%	120,00%

Pencapaian target di atas senantiasa sejalan dengan Nilai Nilai Kementerian Keuangan yang selalu menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan terhadap Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Kanwil DJP Jawa Timur III merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
2. Sumber Daya Sebagai Kekuatan Kantor	8
C. Mandat Organisasi	17
D. Peran Strategis	18
E. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024	20
F. Strategis Issues	22
G. Sistematis Laporan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
B. Program Unggulan dan Prioritas	26
C. Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Renja	29
D. Rencana Kinerja	30
E. Refinement Perjanjian Kinerja (H)	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Realisasi Anggaran	66
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
D. Kinerja Lain-lain	67
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	104
BAB IV PENUTUP	105
Kata Penutup	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memegang peran strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan di tingkat regional, dengan tugas utama mendukung pencapaian target penerimaan negara melalui pengawasan, pelayanan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagai unit yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan dan program nasional dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai bagian dari proses pengelolaan kinerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan laporan kinerja ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pencapaian yang telah diraih oleh Kanwil DJP Jawa Timur III selama periode tahun 2024. Laporan kinerja ini sangat penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program perpajakan di tingkat wilayah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, laporan kinerja ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak, serta memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan.

3. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak.
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.
5. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan.
6. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan.
7. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak.
8. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding.
9. Pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan.
10. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama.
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, risiko dan kepatuhan internal.
12. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor Wilayah untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional.

Secara struktur organisasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Kantor Wilayah yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5 (lima) Kepala Bidang pada tingkat Kantor Wilayah serta 15 (lima belas) Unit Kerja Eselon III yang merupakan instansi vertikal di bawahnya yang terdiri atas 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya, 14 (empat belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Susunan organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III terdiri atas Kepala Kantor sebagai pimpinan yang membawahi:

- a. **Bagian umum**, mempunyai tugas Melaksanakan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

b. **Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan**, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak strategis, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah dan analisis dokumen manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan produksi data lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak strategis, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak strategis, melaksanakan penyiapan bahan penetapan Wajib Pajak strategis, melaksanakan evaluasi dalam rangka penetapan dan/atau pemindahan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Wajib Pajak strategis.

c. **Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian**, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, melaksanakan perencanaan, bimbingan, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian Non-NJOP, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak lainnya, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan berikut kegiatan penjaminan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan assignment Daftar Sasaran Ekstensifikasi beserta pemanfaatannya dan assignment Wajib Pajak lainnya.

d. **Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan**, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan bahan baku pemeriksaan, melaksanakan bimbingan teknis dan

administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan pengendalian rangkaian tata laksana pemeriksaan Wajib Pajak Grup dalam hal anggota Wajib Pajak Grup berada dalam Kantor Wilayah yang sama, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak, melaksanakan kegiatan administrasi kolaborasi penegakan hukum, melaksanakan kegiatan teknis di bidang forensik digital, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen serta pemberian bimbingan, pemantauan pelaksanaan teknis, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengamatan, menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan terkait pengusulan dan kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, menyelenggarakan administrasi forensik digital, sertamelaksanakan pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan Laboratorium Forensik Digital Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

e. **Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat**, mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan edukasi, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan edukasi dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

f. **Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan**, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penyelesaian keberatan, serta penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki wilayah kerja yang luas mulai dari Kabupaten Trenggalek hingga Kabupaten Banyuwangi. Luas wilayah kerja tersebut dibagi dalam 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak Madya, 14 (empat belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 7 (tujuh) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Peta wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III, tabel nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah sebagai berikut::



No	KPP	Lokasi	Jenis KPP	Wilayah Kerja	
				Prov/Kab/Kota	Kecamatan
1	KPP Madya Malang	Malang	Madya	Sebagian Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kecamatan
2	KPP Pratama Kediri	Kediri	Pratama (Kelompok I)	Kota Kediri	Seluruh Kecamatan
3	KPP Pratama Pare	Kediri	Pratama (Kelompok I)	Kab. Kediri	Seluruh Kecamatan
				Kab. Nganjuk	Kecamatan
4	KPP Pratama Malang Selatan	Malang	Pratama (Kelompok I)	Kota Malang	Klojen
					Sukun
					Kedungkandang
5	KPP Pratama Malang Utara	Malang	Pratama (Kelompok I)	Kota Malang	Lowokwaru
					Blimbing
6	KPP Pratama Batu	Batu	Pratama (Kelompok I)	Kota Batu	Seluruh Kecamatan
7	KPP Pratama Pasuruan	Pasuruan	Pratama (Kelompok I)	Kota Pasuruan	Seluruh Kecamatan
				Kab. Pasuruan	Kecamatan
8	KPP Pratama Probolinggo	Probolinggo	Pratama (Kelompok I)	Kota Probolinggo	Seluruh Kecamatan
				Kab. Probolinggo	Kecamatan
				Kab. Lumajan	

9	KPP Pratama Jember	Jember	Pratama (Kelompok I)	Kab. Jember	Seluruh Kecamatan
10	KPP Pratama Banyuwangi	Banyuwangi	Pratama (Kelompok I)	Kab. Banyuwangi	Seluruh Kecamatan
11	KPP Pratama Situbondo	Situbondo	Pratama (Kelompok I)	Kab. Situbondo	Seluruh Kecamatan
				Kab. Bondowoso	
12	KPP Pratama Tulungagung	Tulungagung	Pratama (Kelompok I)	Kab. Tulungagung	Seluruh Kecamatan
				Kab. Trenggalek	
13	KPP Pratama Blitar	Blitar	Pratama (Kelompok I)	Kota Blitar	Seluruh Kecamatan
				Kab. Blitar	
14	KPP Pratama Kapanjen	Kapanjen	Pratama (Kelompok I)	Kab. Malang	Bululawang
					Wajak
					Turen
					Gondanglegi
					Dampit
					Tirtoyudo
					Sumbermanjing
					Wetan
					Ampelgading
					Gedangan
					Bantur
					Pagak
					Pagelaran
					Donomulyo
					Kalipare
					Sumberpucung
Kromengan					
Ngajum					
Wonosari					
Kapanjen					
Pakisaji					
Wagir					
15	KPP Pratama Singosari	Singosari	Pratama (Kelompok I)	Kab. Malang	Tumpang
					Poncokusumo
					Jabung

					Lawang
					Singosari
					Karangploso
					Dau
					Ngantang
					Kasembon
					Pakis
					Tajinan
					Pujon

Adapun berikut ini adalah nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III:

No	KP2KP	Lokasi	Wilayah Kerja		
			Kab/Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Pasuruan					
1	KP2KP Bangil	Bangil	Kab. Pasuruan	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Probolinggo					
2	KP2KP Kraksaan	Kraksaan	Kab. Probolinggo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
3	KP2KP Lumajang	Lumajang	Kab. Lumajang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Tulungagung					
4	KP2KP Trenggalek	Trenggalek	Kab. Trenggalek	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Blitar					
5	KP2KP Wlingi	Wlingi	Kab. Blitar	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Pare					
6	KP2KP Nganjuk	Nganjuk	Kab. Nganjuk	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan
KPP Pratama Situbondo					
7	KP2KP Bondowoso	Bondowoso	Kab. Bondowoso	Seluruh Kecamatan	Seluruh Desa/ Kelurahan

Sebagaimana telah dituangkan daftar tabel nama, lokasi, dan wilayah kerja KPP dan KP2KP, berikut adalah narasi singkat terkait KPP dan KP2KP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya:

- a. Satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yaitu KPP Madya Malang (651) yang wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III khusus untuk Wajib Pajak tertentu.
- b. Adapun 14 (empat belas) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdiri atas:
 1. KPP Pratama Kediri (622) meliputi Kota Kediri
 2. KPP Pratama Malang Selatan (623) meliputi sebagian Kota Malang
 3. KPP Pratama Pasuruan (624) meliputi Kota dan Kabupaten Pasuruan
 4. KPP Pratama Probolinggo (625) meliputi Kota dan Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Lumajang
 5. KPP Pratama Jember (626) meliputi Kabupaten Jember
 6. KPP Pratama Banyuwangi (627) meliputi Kabupaten Banyuwangi
 7. KPP Pratama Batu (628) meliputi Kota Batu
 8. KPP Pratama Tulungagung (629) meliputi Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
 9. KPP Pratama Malang Utara (652) meliputi sebagian Kota Malang
 10. KPP Pratama Blitar (653) meliputi Kota dan Kabupaten Blitar
 11. KPP Pratama Kepanjen (654) meliputi sebagian Kabupaten Malang
 12. KPP Pratama Pare (655) meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk
 13. KPP Pratama Situbondo (656) meliputi Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso
 14. KPP Pratama Singosari (657) meliputi sebagian Kabupaten Malang
- c. Serta 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdiri atas:
 1. KP2KP Wlingi
 2. KP2KP Bangil
 3. KP2KP Trenggalek
 4. KP2KP Bondowoso
 5. KP2KP Kraksaan
 6. KP2KP Lumajang
 7. KP2KP Nganjuk

2. Sumber Daya Sebagai Kekuatan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas utama untuk mengamankan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan sumber daya manusia yang handal, berkomitmen, dan

berkinerja prima dalam melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan besar tersebut.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki 197 (seratus Sembilan puluh tujuh) sumber daya manusia yang terdiri atas 152 (seratus lima puluh dua) pegawai organik dan 45 (empat puluh lima) pegawai non organik. Kebutuhan pegawai organik pada tiap-tiap bidang dan bagian berpedoman pada penataan dan distribusi pegawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, formasi dan distribusi pegawai didasarkan pada kemampuan serta *skill* khusus yang dimiliki.

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum (Eselon III) dan terdiri atas 4 (empat) subbagian yaitu Subbagian Kepegawaian, Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (Eselon IV). Adapun total pegawai pada Bagian Umum sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bagian Umum.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bagian Umum	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Pelaksana
Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal	1	5
SubBagian Kepegawaian	1	7
SubBagian Keuangan	1	4
SubBagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	7
Total	28	

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang DP3 (Eselon III) dan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Bimbingan Pengawasan, Seksi Data dan Potensi, dan Seksi Dukungan Teknis Komputer yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Eselon IV). Adapun total pegawai pada Bidang DP3 sebanyak 13 (tiga belas) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bidang DP3.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Pelaksana
Seksi Bimbingan Pengawasan	1	3
Seksi Data dan Potensi	1	5

Seksi Dukungan Teknis Komputer	1	1
Total	13	

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang PEP (Eselon III) dan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Bimbingan Pendaftaran, Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, serta Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Eselon IV). Adapun total pegawai pada Bidang PEP sebanyak 12 (dua belas) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bidang PEP.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Pelaksana
Seksi Bimbingan Ekstensifikasi	1	4
Seksi Bimbingan Pendaftaran	1	2
Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan	1	2
Total	12	

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang P2IP (Eselon III) dan terdiri atas 4 (empat) seksi yaitu Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, serta Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Eselon IV). Adapun total pegawai pada Bidang P2IP sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bidang P2IP.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Pelaksana
Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan	1	4
Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	1	3
Seksi Bimbingan Penagihan	-	2
Seksi Intelijen	1	6
Total	19	

Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang P2Humas (Eselon III) dan terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, serta Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Eselon IV). Adapun

total pegawai pada Bidang P2Humas sebanyak 9 (sembilan) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bidang P2Humas.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Pelaksana
Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	1	1
Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen	1	2
Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	2
Total	9	

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan (KBP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang KBP (Eselon III) dan terdiri atas 4 (empat) seksi yaitu Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III, serta Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan IV yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Eselon IV). Adapun total pegawai pada Bidang KBP sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Berikut adalah tabel rincian formasi dan distribusi pegawai pada Bidang KBP.

Unit Eselon III	Kepala	
Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	1	
Unit Eselon IV	Kepala	Penelaah Keberatan / Pelaksana
Seksi Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan I	1	6
Seksi Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan II	1	7
Seksi Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan III	1	8
Seksi Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV	1	9
Total	35	

Jabatan Fungsional pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III terdiri atas 4 (empat) jenis jabatan fungsional yaitu sebagaimana tabel berikut.

Kelompok Jabatan Fungsional	Jumlah
Fungsional Pemeriksa Pajak	14
Fungsional Penyidik PNS	14
Fungsional Penyuluh	3
Fungsional Penilai	4
Total	35

Apabila distribusi dan komposisi pegawai diurutkan berdasarkan sebaran pada tiap bagian/bidang, maka di bawah adalah tabel rincian distribusi sebaran pegawai.

No	Bagian/Bidang	Jumlah
1	Kepala Kantor Wilayah	1
2	Bagian Umum	28
3	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	13
4	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	12
5	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	19
6	Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat	9
7	Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan	35
8	Kelompok Jabatan Fungsional	35
Jumlah		152

Sumber data kepegawaian per tanggal 28 Desember 2024

Dari 152 (seratus lima puluh dua) pegawai organik pada Kanwil DJP Jawa Timur III, didapatkan data komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin/gender sebagai berikut.

Gender	Jumlah	Persentase
Pria	112	73,68%
Wanita	40	26,32%
Total	152	100,00%

Adapun rentang usia para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur III terbentang antara usia 20 s.d. di atas 50 tahun sebagaimana data di bawah ini.

Rentang Usia	Jumlah	Persentase
20 s.d. 30 tahun	41	26,97%
30 s.d. 40 tahun	40	26,32%
40 s.d. 50 tahun	37	24,34%
di atas 50 tahun	34	22,37%
Total	152	100,00%

Mengenai jenjang pendidikan yang ditempuh para pegawai Kanwil DJP Jawa Timur III, dapat didapatkan data sebagai berikut.

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tk. Akademi (D1)	28	18,42%
Tk. Akademi (D3)	27	17,76%

Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	56	36,84%
Tk. Pasca Sarjana (S2)	41	26,97%
Total	152	100,00%

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tujuan organisasi sulit dapat tercapai. Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III:

1. Bangunan Gedung

Bangunan gedung Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III terdiri dari 5 lantai dengan rincian penggunaan pada masing-masing lantai adalah sebagai berikut :

a. Lantai *Basement*

digunakan sebagai area gudang penyimpanan persediaan peralatan kantor, gudang penyimpanan dokumen, gudang penyimpanan souvenir dan peralatan penunjang lainnya.

b. Lantai Lobby Utama

Digunakan sebagai area penerimaan tamu, area *Flexible Working Space* (FWS), pojok baca, area rapat dan pembahasan bersama wajib pajak, serta ruang kerja Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.

c. Lantai 1

Lantai 1 diperuntukan sebagai ruang kerja Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, ruang kerja Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian; serta ruang kerja Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, juga disediakan ruang rapat untuk rapat internal pada bidang-bidang tersebut.

d. Lantai 2

Lantai 2 diperuntukan sebagai ruang Kepala Kantor dan Sekretariat, ruang kerja Bagian Umum, ruang kerja Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, ruang server dan ruang rapat

e. Lantai 3

Lantai 3 dibagi menjadi yaitu aula pertemuan utama, aula kecil, gudang penyimpanan, ruang laktasi, ruang dokter dan konseling, serta beberapa studio yang digunakan untuk keperluan podcast, pertemuan daring, dan uji kompetensi

2. Area Luar Gedung

Pada area luar gedung terdapat sarana dan prasarana penunjang lainnya, antara lain Masjid Sholahuddin, Kantin, Ruang genset, Area hijau "Botanical Garden", Area parkir halaman depan dan belakang, Arek titik Kumpul, Pos satpam, *Guiding block*/akses jalan bagi penyandang disabilitas

3. Kendaraan Dinas

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki total Kendaraan Dinas eksisting per 31 Desember 2024 sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri atas 1 (satu) Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat, 12 (dua belas) Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat, dan 5 (lima) Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua dengan rincian sebagai berikut:

No	Kendaraan Dinas Roda Empat	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Jeep	Rusak Berat	2015	1
2	Jeep	Baik	2023	1
3	Station Wagon	Rusak Berat	2006	2
4	Station Wagon	Rusak Ringan	2011	1
5	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Rusak Berat	2007	1
6	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2015	2
7	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2018	1
8	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	2020	3
9	Pick Up	Baik	2015	1
Total				13

No	Kendaraan Dinas Roda Dua	Kondisi	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Sepeda Motor	Baik	2018	4
2	Sepeda Motor	Baik	2020	1
Total				5

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) unit Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat berupa Station Wagon dengan tahun perolehan 2006 yang telah dilakukan penjualan secara lelang.

4. Rumah Dinas

Fasilitas Rumah Negara yang dikuasai dan dipelihara oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rumah yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Malang. Adapun rincian dan lokasi rumah negara tersebut terdapat dalam tabel di bawah ini :

No	Jenis Rumah Negara	Kondisi	Tahun Perolehan	Alamat	Ket
1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Baik	1967	Anggur No. 3	-

2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	2002	Jalan Kaliurang No. 45	-
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1967	Sidoarjo No. 9	-
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1967	Sidoarjo No. 5	-
5	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1974	Sidoarjo No. 7	-
6	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rusak Berat	1974	Setaman Dalam No. 51A	-
7	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rusak Ringan	1970	Wijaya Kusuma No. 15	Sudah Selesai Pelaksanaan Renovasi di Akhir Tahun 2023 dan belum di update kondisi pada aplikasi
8	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rusak Ringan	1983	Wijayakusuma No. 17	Sudah Selesai Pelaksanaan Renovasi di Akhir Tahun 2023 dan belum di update kondisi pada aplikasi
9	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1986	Sidoarjo No. 11	-
10	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Rusak Berat	1986	Jl. Surabaya No. 11	-
11	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1986	Jalan Mojokerto No. 1	-
12	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	1967	Jalan Bantaran Indah Blok G No. 42	-
13	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	2013	Jalan Wijayakusuma No. 34	-

14	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Baik	2013	Jalan Wijayakusuma No. 36	-
15	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rusak Berat	1967	Bantaran Indah Blok G No. 41	-
16	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rusak Berat	1965	Bantaran Indah Blok G No. 45	-
17	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	1965	Bantaran Indah Blok G No. 46	-
18	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rusak Berat	1970	Setaman Dalam No. 52B	-
19	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rusak Ringan	1970	Setaman Dalam No. 53C	Sudah Selesai Pelaksanaan Renovasi di Akhir Tahun 2023 dan belum di update kondisi pada aplikasi
20	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Rusak Ringan	1970	Setaman Dalam No. 54D	Sudah Selesai Pelaksanaan Renovasi di Akhir Tahun 2023 dan belum di update kondisi pada aplikasi
21	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2013	Jalan Wijayakusuma No. 42	-
22	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2013	Wijayakusuma No. 44	-
23	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2013	Jalan Wijayakusuma No. 46	-
24	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2013	Jalan Wijayakusuma No. 48	-
25	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2015	Jl. Wijaya Kusuma No. 38	-

26	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2015	Jl. Wijaya Kusuma No. 40	-
27	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik	2015	Jl. Bantaran Indah Blok G No. 42A	-
28	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Rusak Berat	1983	Songgolangit 10A	-
29	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Rusak Berat	1985	Songgolangit 10B	-

Untuk kondisi Rumah Negara yang Rusak Berat telah dilakukan usulan renovasi melalui Izin Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara (IPKP BMN) dan sedang menunggu penetapan dan persetujuan.

C. Mandat organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memperoleh mandat untuk merealisasikan pendapatan dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp36.050.692.951.000,00 (tiga puluh enam triliun lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Adapun komposisi penerimaan pajak sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tersebut seperti pada tabel di bawah:

No	Jenis Pajak	Penerimaan	
		Nominal	Persentase
1	PPh Non Migas Selain PPh OP dan PPh Pasal 21	6,72 Triliun	18,64%
2	PPh OP	0,42 Triliun	1,16%
3	PPh Pasal 21	3,88 Triliun	10,76%
4	PPN dan PPnBM	24,58 Triliun	68,17%
5	PBB	0,14 Triliun	0,39%
6	Pajak Lainnya	0,32 Triliun	0,88%
Total		36,05 Triliun	100,00%

Target penerimaan pajak tersebut terdiri atas PPh Non Migas selain PPh OP dan PPh 21 sebesar Rp 6.721.265.405.000,00 (enam triliun tujuh ratus dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah), PPh Orang Pribadi sebesar Rp 416.924.421.000,00 (empat ratus enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.878.922.908.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), PPN dan PPnBM sebesar Rp24.575.972.736.000,00 (dua puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), PBB sebesar Rp139.607.279.000,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan Pajak Lainnya sebesar Rp318.000.202.000,00 (tiga ratus delapan belas milyar dua ratus dua ribu rupiah).

D. Peran Strategis Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Salah satu fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yaitu pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan. Hal itu menjadikan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya mengamankan rencana penerimaan negara demi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam sektor pemerintahan dan pembangunan baik infrastruktur dan sumber daya manusia. Hal ini tergambar dari peran Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III jika ditinjau dari tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan target penerimaan negara untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.050.692.951.000,00 (tiga puluh enam triliun lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Adapun realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebesar Rp36.072.369.092.334.000,00 (tiga puluh enam triliun tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Adapun sektor dominan penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Penerimaan	
		Nominal	Persentase
1	Industri Pengolahan	25,02 Triliun	69,36%
2	Perdagangan Besar dan Eceran	3,30 Triliun	9,14%
3	Administrasi Pemerintahan	2,62 Triliun	7,30%
4	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,12 Triliun	3,09%
5	Pengangkutan dan Pergudangan	0,70 Triliun	1,95%
6	Konstruksi	0,51 Triliun	1,42%
7	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan	0,45 Triliun	1,28%
8	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,37 Triliun	1,04%

9	Lainnya	1,96 Triliun	5,43%
Total		32,87 Triliun	100,00%

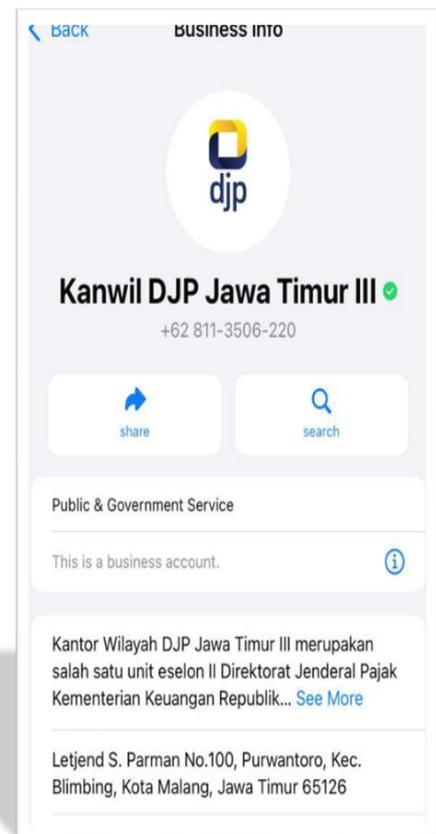
Berikut adalah sektor dominan yang menghasilkan penerimaan pajak paling signifikan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada tahun 2024 antara lain:

1. Sektor dominan pertama adalah Industri Pengolahan sebesar Rp25.020.274.386.604,00 (dua puluh lima triliun dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah) dengan kontribusi terhadap total penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebesar 69,36%.
2. Sektor dominan kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp3.296.836.378.041,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah) dengan kontribusi sebesar 9,14%.
3. Sektor dominan ketiga adalah Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp2.631.703.929.011,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sebelas rupiah) dengan kontribusi sebesar 7,30%.
4. Sektor dominan keempat adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp1.115.578.544.755,00 (satu triliun seratus lima belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan kontribusi sebesar 3,09%.
5. Sektor dominan kelima adalah Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp702.848.654.503,00 (tujuh ratus dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) dengan kontribusi 1,95%.
6. Sektor dominan keenam adalah Konstruksi sebesar Rp511.261.095.881,00 (lima ratus sebelas milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan kontribusi 1,42%.
7. Sektor dominan ketujuh adalah Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja sebesar Rp461.103.998.040,00 (empat ratus enam puluh satu milyar seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh rupiah) dengan kontribusi 1,28%.
8. Sektor dominan kedelapan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp373.431.662.651,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan kontribusi 1,04%.
9. Sektor lainnya di luar 8 (delapan) sektor dominan di atas, menyumbang sebesar Rp1.959.330.442.848,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan kontribusi 5,43%.

E. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024

Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III turut berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) yang berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III nomor KEP-260/WPJ.12/2024 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Nomor KEP-48/WPJ.12/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024. Pembangunan ZIWBK bukan hanya sekadar program, melainkan bentuk nyata reformasi birokrasi dan komitmen nyata dalam mengubah pola kerja birokrasi, dengan mengedepankan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya DJP untuk memperkuat sistem perpajakan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat. Salah satu elemen penting dari transformasi kelembagaan adalah inovasi dalam pelayanan kepada wajib pajak dan masyarakat. Salah satu contoh inovasi yang terdapat di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah Whatsapp Business API untuk mewujudkan berbagai jenis layanan perpajakan online melalui satu pintu, yaitu satu nomor Whatsapp untuk seluruh jenis layanan perpajakan. Inovasi ini meminimalisir penipuan yang mengatasnamakan Kanwil DJP Jawa Timur III oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, memungkinkan dan memudahkan banyak *agent* atau petugas untuk menjawab pertanyaan atau konsultasi Wajib Pajak, serta menerapkan standardisasi pelayanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas atas informasi yang diberikan kepada wajib pajak. Dengan adanya inovasi ini Kanwil DJP Jawa Timur III dapat memberikan respons yang lebih cepat dan akurat terhadap pertanyaan atau keluhan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.



Dampak yang dirasakan dengan adanya inovasi Whatsapp Business API, antara lain:

Sebelum adanya inovasi Whatsapp Business API :

- Komunikasi terhadap wajib pajak tidak efisien karena petugas Whatsapp harus menunggu dan meneruskan jawaban dari petugas pemilik proses bisnis.
- Pertanyaan bersifat umum harus dijawab manual tanpa otomatisasi aplikasi.
- Wajib pajak meragukan kredibilitas pesan yang disampaikan oleh nomor yang tidak dikenal.
- Tidak terdapat data statistik pengiriman pesan kepada wajib pajak.

Sesudah adanya inovasi Whatsapp Business API:

- Nomor WhatsApp terverifikasi resmi oleh META sehingga menutup celah kemungkinan adanya penipuan yang mengatasnamakan Kanwil DJP Jawa Timur III.
- Terdapat fitur untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis.
- Sistem akan secara otomatis memetakan jenis pesan dan meneruskan pesan kepada petugas pemilik proses bisnis.
- Kepercayaan Wajib Pajak akan kredibilitas pesan yang dikirimkan meningkat dibuktikan dengan data statistik berupa 352 pesan broadcast yang terkirim dengan read total mencapai 328 (80%).

	NAMA PK	SEKSI	KELOMPOK BERKAS					TOTAL
			A	B	C	D	E	
3	Chandra	KBP 1	57	21	33	15	76	202
4	Ida	KBP 1	34	21	71	48	58	224
5	Ika	KBP 1	4	0	7	135	45	191
6	Iman	KBP 1	24	3	58	117	52	254
7	Iwan	KBP 1	53	0	27	37	89	206
8	Tri	KBP 1	8	1	0	48	101	150
9	Total KBP 1		180	46	196	384	421	1227
10	Arindra	KBP 2	23	0	0	32	187	242
11	Badrus	KBP 2	9	0	7	47	147	210
12	Barkah	KBP 2	0	0	4	62	0	66
13	Bayu	KBP 2	33	10	35	14	38	130
14	Dedy	KBP 2	25	4	46	71	123	269
15	Fadlillah	KBP 2	30	0	0	49	133	212
16	Yohana	KBP 2	70	13	24	0	14	121
26	Andik	KBP 4	42	5	14	13	5	79
27	Anndy	KBP 4	4	0	0	6	154	164
28	Dhanang	KBP 4	21	0	51	44	100	216
29	Rahadi	KBP 4	0	0	0	0	0	0
30	Sari	KBP 4	43	0	38	91	137	309
31	Siti	KBP 4	90	0	0	10	125	225
32	Yayok	KBP 4	58	0	54	165	50	327
33	Total KBP 4		258	5	157	329	571	1320
34	Grand Total		755	163	622	1269	2463	5272
36	Keterangan Kelompok Berkas							
37	A : Diterima di sekre dalam jangka waktu lebih dari 28 hari sampai dengan jatuh tempo							
38	B : Diterima di sekre dalam jangka waktu 22 - 28 hari sampai dengan jatuh tempo							
39	C : Diterima di sekre dalam jangka waktu 15 - 20 hari sampai dengan jatuh tempo							
40	D : Diterima di sekre dalam jangka waktu 7 - 14 hari sampai dengan jatuh tempo							
41	E : Diterima di sekre dalam jangka waktu kurang dari 7 hari sampai dengan jatuh tempo							

Selain inovasi Whatsapp Business API, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III juga memiliki inovasi lainnya yaitu e-Teken. E-Teken adalah sebuah sistem berbasis SharePoint yang dirancang untuk mempercepat alur pengawasan berkas dan mempermudah proses pembubuhan tanda tangan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III melalui Sekretariat. Dengan fitur

monitoring kinerja yang terintegrasi, sistem ini memungkinkan penelaah keberatan untuk melacak berkas secara real-time dengan lebih mudah dan efisien.

Dikelola langsung oleh Pelaksana Bidang KBP dan Sekretariat, e-Teken menjadi salah satu wujud nyata transformasi digital dalam mendukung tugas dan fungsi Kanwil DJP Jawa Timur III. Inovasi ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan berkas, sehingga pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan lebih optimal. Inovasi ini

sejalan dengan salah satu tujuan utama dari reformasi birokrasi yaitu untuk menciptakan proses yang lebih sederhana, efisien, dan transparan.

Dampak yang dirasakan dengan adanya inovasi e-Teken, antara lain:

Sebelum adanya inovasi e-Teken:

- Proses pencatatan berkas dilakukan secara manual menggunakan buku ekspedisi.
- Berkas yang diserahkan ke Sekretariat untuk dimintakan tanda tangan harus dicatat satu per satu, mengakibatkan alur berkas menjadi lambat.
- Penelaah keberatan kesulitan memantau keberadaan berkas yang sedang diproses.
- Digitalisasi sempat dilakukan menggunakan spreadsheet, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dan pelacakan data secara efektif.

Setelah adanya inovasi e-Teken:

- Pencatatan berkas dilakukan secara elektronik, terintegrasi langsung dengan database permohonan.
- Alur pengelolaan berkas menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
- Fitur monitoring kinerja memudahkan penelaah keberatan untuk melacak berkas secara real-time.
- Sistem mendukung proses yang lebih terstruktur dan mengurangi potensi kesalahan manual.

F. Strategic Issues

Beberapa permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Penopang Penerimaan PPM Kanwil DJP Jawa Timur III adalah Industri Hasil Tembakau (IHT) dimana saat ini produksi rokok IHT sedang berkontraksi akibat regulasi kenaikan tarif cukai rokok dan tarif PPN
2. Beban kerja Penyelesaian Administrasi Perpajakan (PAP) di KPP cukup tinggi, terutama terkait dengan Pengembalian Pendahuluan Pasal 17 D sehingga tenaga penyuluh harus dapat membagi waktu untuk melakukan kegiatan edukasi tema III yaitu edukasi yang bertujuan perubahan perilaku dengan mengerjakan PAP dan kepatuhan SPT Tahunan;
3. Aplikasi SISULUH yang terkadang masih belum lancar (lemot) sehingga terdapat kendala ketika melakukan penginputan kegiatan edukasi dan penyuluhan yang telah dilakukan penyuluh.
4. Tingkat kehadiran wajib pajak dalam kegiatan edukasi belum optimal.
5. Pengakuan PKM WRA Edukasi dan Pelayanan terkendala karena setelah penyuluh melakukan edukasi dan ada pembayaran sesuai BA WRA, ternyata sudah pernah diterbitkan SP2DK

namun belum ditutup oleh Account Representative (AR) sehingga saat SP2DK ditutup maka realisasi WRA edukasi hilang dari Dashboard Revenue Management.

6. Beberapa penyuluh belum memahami dengan betul ketentuan pelaporan kegiatan pada aplikasi SISULUH berdasarkan kebijakan edukasi tahun 2024 terbaru, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diakui sebagai realisasi karena terlambat dilaporkan.
7. Pengisian survey kepuasan pelayanan, survey efektivitas kehumasan dan survey efektivitas penyuluhan oleh Wajib Pajak, diluar kendali petugas fiskus.
8. Kemampuan komunikasi petugas baik di front office maupun penyuluh pajak belum merata.
9. Account Representative (AR) belum memahami bagaimana penggalian potensi terutama AR baru promosi dikarenakan tidak adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan sebelumnya.
10. Masih terdapat Penyelesaian tindak lanjut DPP (LHPt dan LHP2DK) yang belum optimal.
11. Realisasi bahan baku fungsi pemeriksaan terhadap DSPP perlu lebih diperhatikan dan perlu menyusun strategi agar lebih optimal kedepannya.
12. Terdapat pemeriksaan dengan nilai SKP besar tetapi tidak disetujui dan dibayar oleh Wajib Pajak dan kurangnya usulan bahan baku oleh KPP dengan target PKM Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
13. Kurangnya pemahaman fungsional pemeriksa terhadap fungsi penilaian.
14. Keterbatasan Fungsional Penilai dalam mengakses data AHU, Approweb, Apportal, dsb
15. Salah satu faktor yang memengaruhi realisasi IKU ini di triwulan IV dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu hasil survei yang dilakukan oleh responden
16. Pada Indikator Deviasi Halaman III, di triwulan II mencatatkan deviasi sebesar 3,09% karena realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana penarikan dana.

G. Sistematis Laporan

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif merupakan bagian penting dalam penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tahun 2024 ini, yang menyajikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai capaian nilai kinerja organisasi dan penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III selama periode tahun 2020 s.d tahun 2024.

2. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Mandat Organisasi, Peran Strategis, Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024, *Strategic Issues* serta Sistematika Pelaporan.

3. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan mengenai Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja, Program Unggulan dan Prioritas Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Renja, dan Refinement Perjanjian Kinerja (H). Pada bab ini juga diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024, termasuk penjelasan addendum kontrak kinerja.

4. BAB III Akuntabilitas Kinerja Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini menyajikan capaian kinerja Kantor Kanwii DJP Jawa Timur III dengan membandingkan target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2024, uraian upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko, dan uraian rencana aksi tahun mendatang. Selain itu, dalam bab ini juga menguraikan realisasi anggaran unit kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kinerja lain-lain yang dilakukan Kanwii DJP Jawa Timur III guna mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan pencapaian tujuan perpajakan yang optimal

5. Penutup

Pada bagian penutup dalam LAKIN menyajikan poin penting yang menegaskan komitmen organisasi terhadap perbaikan kinerja dan menyampaikan pesan yang positif, penuh harapan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sekaligus memberikan apresiasi atas kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Selain itu pada bagian penutup ini juga memberikan ucapan terima kasih kepada para wajib pajak karena telah membantu pembangunan negara tercinta ini melalui kesadaran membayar pajak. Dan tak lupa juga menghaturkan rasa syukur dan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa menyertai langkah kita.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mengikuti unit vertikal Kantor Pusat DJP yang disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Beberapa fokus utama dalam rencana strategis Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III meliputi:

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Optimalisasi Penerimaan Negara
3. Penegakan Hukum Perpajakan
4. Peningkatan Kompetensi SDM
5. Transformasi Digital
6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Hal tersebut sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 yaitu ***“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*** dan juga beriringan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Visi dan misi DJP tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan program operasional. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Dalam tujuan dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
3. Dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Untuk mengukur pencapaian visi dan misi DJP, telah ditetapkan indikator-indikator kinerja utama (IKU) sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja.

Direktorat Jenderal Pajak juga turut andil dalam memberikan dukungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
2. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan system administrasi perpajakan yang terintegrasi

B. Program Unggulan dan Prioritas Kanwil DJP Jawa Timur III

Kanwil DJP Jawa Timur III terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai program unggulan yang berfokus pada kemudahan bagi wajib pajak, transparansi, serta peningkatan kepatuhan pajak. Program-program ini dirancang untuk mendukung tercapainya penerimaan negara. Beberapa program unggulan DJP yang telah berjalan di tahun 2024, antara lain:

1. KORSA (Kolaborasi, Reorganisasi, Segmentasi, dan Akselerasi) sebagai Budaya Kerja dan Semangat Pembagian Wilayah Kerja

Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki wilayah kerja yang luas yang meliputi 19 kabupaten/kota dari Trenggalek hingga Banyuwangi, menghadapi tantangan pengelolaan wilayah yang luas dengan beragam karakteristik ekonomi dan sektor penerimaan. Untuk menjawab tantangan ini, ditetapkan sebuah program unggulan, yaitu KORSA (Kolaborasi, Optimalisasi, Relevansi, Sinergi, dan Akuntabilitas) sebagai pedoman pola pikir dan budaya kerja guna mencapai target penerimaan pajak serta menciptakan keadilan bagi wajib pajak.

Adapun esensi penetapan KORSA sebagai budaya kerja dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- ❖ Kolaborasi yaitu kegiatan kolaborasi dan kerja sama dengan tim internal maupun kerja sama kelembagaan.
- ❖ Reorganisasi yaitu memperkuat sinergi tim internal serta mengorganize bagaimana cara kerja Kanwil. Wujud dari konsep ini adalah dibentuknya berbagai macam tim yang melibatkan berbagai macam bidang atau KPP.
- ❖ Segmentasi yaitu cara untuk membuat klasifikasi atau pemilahan atas suatu objek, baik data, WP, penerimaan, berdasarkan perspektif segmen tertentu yang bersifat strategis sebagai bahan penyusunan skala prioritas.
- ❖ Akselerasi yaitu melakukan seluruh upaya untuk mempersingkat jangka waktu pelaksanaan program di semua lini fungsi, mulai pengawasan, pemeriksaan, hingga penagihan. Hal ini menjadi penting karena akselerasi mendukung pengambilan keputusan di level manajemen.

Semangat KORSA diterapkan melalui pembagian wilayah kerja berdasarkan kesamaan potensi dan letak geografisnya. pembagian wilayah kerja tersebut dibagi menjadi tiga zona utama yaitu :

1. Wilayah Barat

Memiliki Luas wilayah sebesar 6.245 Km² yang meliputi Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Terdiri dari KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Tulungagung, dan KPP Pratama Blitar.

2. Wilayah Tengah

Malang raya memiliki luas wilayah sebesar 3.812 Km² yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Terdiri dari KPP Madya Malang, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Singosari, KPP pratama Kepanjen, dan KPP Pratama Pasuruan.

3. Wilayah Timur

Memiliki luas wilayah 17.123 Km² yang meliputi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo. Terdiri dari KPP Pramata Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Situbondo, dan KPP Pratama Banyuwangi.

Pembagian wilayah ini didasarkan pada karakteristik ekonomi, sektor penerimaan, dan potensi khas di setiap daerah, sehingga pengelolaan wilayah dapat lebih efektif dan terarah. Contohnya adalah untuk wajib pajak dengan karakteristik serupa di wilayah/cluster yang sama, diterapkan treatment yang seragam, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan capaian kinerja antar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam cluster yang sama.

Setiap wilayah tersebut memiliki sektor unggulan masing masing, seperti contohnya di Wilayah Barat sektor unggulannya adalah sektor peternakan dan perikanan darat. dengan adanya pembagian wilayah ini, maka akan menciptakan persaingan sehat antar KPP yang berada di Wilayah Barat untuk mencapai hasil terbaik. selain menciptakan persaingan sehat juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar KPP.

2. Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penerimaan Melalui Aplikasi Simponi

SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan monitoring kinerja penerimaan, pengawasan, dan penyajian informasi terkini secara mobile. Aplikasi ini hadir sebagai respons terhadap pola kerja baru pasca-pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Work From Anywhere (WFA), yang memungkinkan pegawai bekerja secara remote kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pembuatan Simponi bertujuan untuk memudahkan pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengakses kinerja penerimaan secara *realtime*.



Beberapa manfaat dari aplikasi SIMPONI, antara lain:

- Monitoring kinerja penerimaan dan kepatuhan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui browser, mendukung pola kerja Work From Anywhere (WFA).
- Pegawai dapat mengakses materi kegiatan seperti Bimtek dan Rakorda di satu tempat, menggantikan metode pengiriman melalui pesan pribadi.
- Integrasi dengan login Microsoft Office 365 mendorong pegawai untuk memanfaatkan lisensi yang tersedia.
- Penyimpanan dan pelacakan data historis kinerja penerimaan menjadi lebih mudah, memungkinkan analisis yang lebih efisien.

3. Menjaga kesehatan mental pegawai dengan program HAI Jatim III

Kesehatan mental di tempat kerja adalah salah satu aspek penting yang sering kali kurang mendapatkan perhatian, meskipun dampaknya sangat besar terhadap produktivitas, kinerja, dan kesejahteraan pegawai. Untuk itu Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III juga memiliki program unggulan lainnya yaitu HAI Jatim III. Program ini memberikan ruang kepada seluruh pegawai untuk mencurahkan isi hati dan pikiran dalam wadah konseling dalam program HAI (Hearing, Advising, Inspiring) Jatim III. Kepala SubBagian Kepegawaian Kanwil DJP Jawa Timur III merupakan salah satu Konselor Kementerian Keuangan yang dapat memberikan bantuan layanan konseling kepada pegawai dalam rangka membantu pegawai mengurai hambatan-hambatan dalam pencapaian produktivitas kinerja. Manfaat dari program HAI Jatim III antara lain :

- a. Pegawai dapat mencurahkan isi hati dan pikiran secara bebas dalam konseling;
- b. Pegawai tidak sampai mencurahkan isi hati dan pikiran melalui media sosial, karena sudah tersampaikan melalui konseling;
- c. Pegawai mendapat pendampingan dalam mengurai hambatan sehingga kinerjanya dapat tercapai;
- d. Pegawai mendapat pendampingan saat mengalami gangguan mental atau saat berada di titik terendahnya sehingga tidak sampai mengambil jalan pintas.

C. Perencanaan Anggaran dan penyusunan Renja

Kinerja perencanaan anggaran pada level satker dinilai dari dua indikator penilaian yaitu efektivitas dan efisiensi. Penilaian efektivitas anggaran dilihat dari capaian rincian output yaitu membandingkan realisasi volume rincian output dengan target volume rincian output. Pada akhir 2024, Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki 18 rincian output yang semuanya mencapai target. Sedangkan penilaian efisiensi anggaran dilihat dari implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK). Nilai efisiensi satker ini memperhitungkan penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Pada Direktorat Jenderal Pajak, rincian output yang diperhitungkan SBK-nya adalah Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan. Kanwil DJP Jawa Timur III mendapat nilai maksimal pada efisiensi SBK yaitu 100, yang artinya penyerapan anggaran pada rincian output Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan dibandingkan dengan realisasi volume rincian output tersebut tidak melebihi SBK pada PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Monitoring Efisiensi SBK

Download Excel

Tampilkan 11 entri

Cari:

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uralan SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	FVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	Ditjen Pajak	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (Regiater)	baru	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	496.000.000	925.455.833	26,00	61,00	15.171.407	442.828.593	97	20	Diperhitungkan maksimal (max +20%), Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBK.

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-03-23 14:39:51

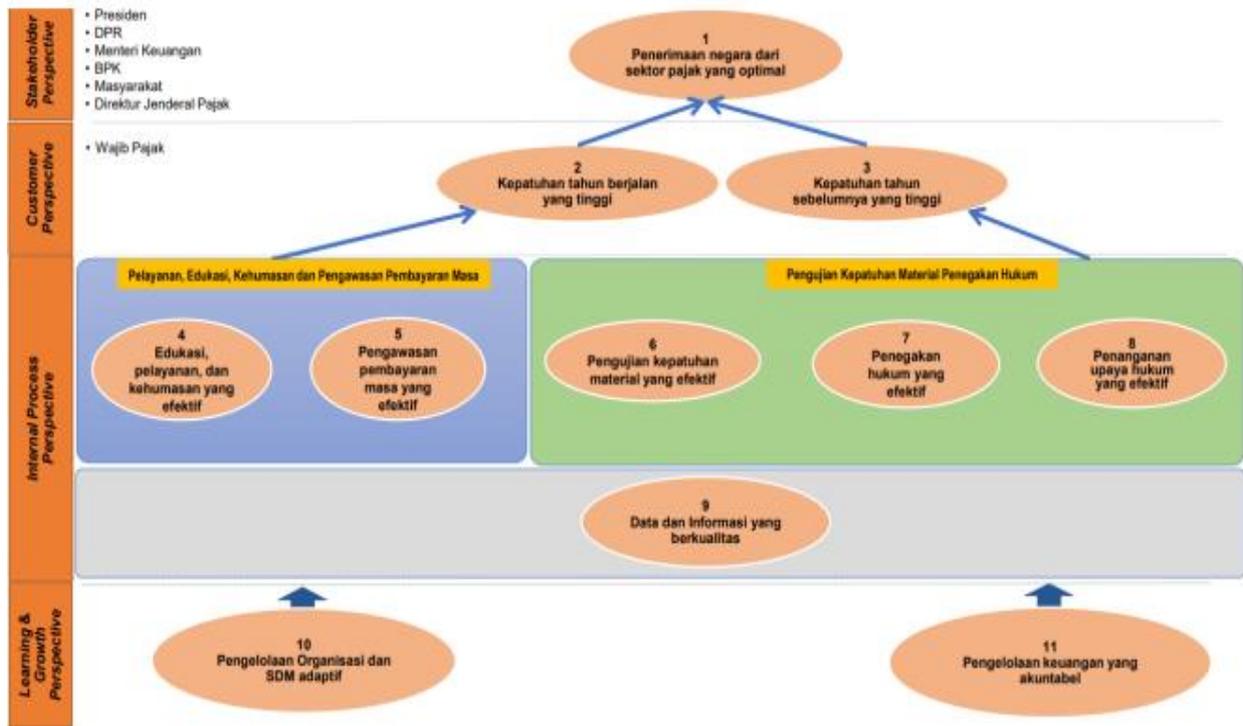
Rincian Output (RO)	Target Volume Rincian Output (VRO)	Realisasi VRO Kumulatif	Detil Realisasi RO Bulanan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4791.BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/	2282	5868	187	139	2019	559	220	1585	372	24	121	104	245	293
4792.BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4792.BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	26	61	4	5	7	5	6	3	2	2	9	6	6	6
4794.BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	18304	29544	1451	1852	2094	1000	2000	2000	1667	1498	1498	1498	1498	11488
4794.BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	58	70	2	3	32	0	1	2	3	2	8	4	4	9
4794.BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/	2589	4567	99	166	259	117	382	515	446	546	879	864	117	177
4794.BIG.005 Laporan Penilaian	15	40	5	1	4	2	1	7	4	3	4	5	2	2
6209.BCE.001 Dokumen Penyelesaian Banding DJP	939	939	16	0	12	27	1	34	30	22	1	265	265	266
6209.BCE.002 SK Keberatan/Non Keberatan	12465	25284	2461	1523	1417	1299	2043	1033	1187	1187	9044	544	714	2832
6210.BIG.003 Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	36	48	1	5	13	3	3	3	0	4	1	7	0	8
6210.BIG.004 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	14	14	1	0	0	0	0	0	3	2	1	5	1	1
6210.BIG.006 Laporan Penyidikan Telah Selesai	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4707.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Informasi	6	6	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1
4707.EBA.001 Kerumahtangaan	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4707.EBA.994 Layanan Perkantoran	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4707.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	28	28	0	0	0	0	0	0	6	0	15	0	0	7
4708.EBA.994 Layanan Perkantoran	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4708.EBC.004 Administrasi Kepegawaian	54	124	0	80	36	8	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Rencana Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Peta Strategi DJP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



Sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memiliki peta strategi yang berisi sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai beserta indikator kinerja utama sebagai alat ukurnya, antara lain:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
4. Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
7. Penegakan Hukum yang Efektif
8. Penanganan Upaya Hukum yang Optimal
9. Data dan Informasi yang Berkualitas
10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
11. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

E. Refinement Perjanjian Kinerja (H)

Dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja. Rencana Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun 2024 telah dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja utama (IKU), dengan rincian target kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%
		Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif	Persentase Perubahan Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%
6	Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif	Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu	100%
7	Penegakan Hukum yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%
8	Penanganan Upaya Hukum yang Optimal	Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu	86,5%
		Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif	63%
9	Data dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100%
		Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%
11	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024

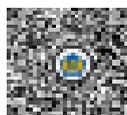
Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Pemerintahan Negara</i>	Rp	3.647.579.000
1. Ekstensifikasi Pemerintahan Negara	Rp	727.165.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	1.151.425.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	991.903.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Cugatan	Rp	79.317.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	697.769.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	8.731.940.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.956.134.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.775.806.000
Total	Rp	12.379.519.000

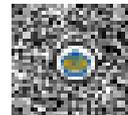
Malang, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik
Farid Bachtiar

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Timur III berhasil menghimpun penerimaan pajak di atas 100%. Capaian yang sangat baik dalam lima tahun berturut-turut menjadi prestasi yang luar biasa menjadikan Kanwil DJP Jawa Timur III quintrick penerimaan 100%. Sedangkan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun 2024 adalah 109,75% (seratus sembilan koma tujuh puluh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	VIC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	103,45
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,45
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	108,09	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,09
Customer Perspective							20,00%	101,16
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,19
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,11%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,11
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,13
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,13%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,13
Internal Process Perspective							25,00%	116,75
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113,67
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,33%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,33
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							110,41
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/lata keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	100,82%	Max	P/M	14,00%	50,00%	100,82
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	115,17%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							117,87
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,19%	Max	P/M	14,00%	40,00%	114,67
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	91,27%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							118,52
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	116,50%	Max	P/M	14,00%	42,42%	116,50
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	83,40%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	117,17
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,34
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,93	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	114,14%	Max	P/M	14,00%	33,33%	114,14
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	98,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,75

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Sumber : Aplikasi Mandor per tanggal 4 Januari 2025

Untuk penyusunan LAKIN DJP Tahun 2024, Pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis, antara lain:

1. Sasaran Strategis 1 "Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal" (1a-CP) "IKU Persentase realisasi penerimaan pajak"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	19.00%	46.00%	46.00%	74.00%	74.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	24.07%	49.42%	49.42%	66.59%	66.59%	100.06%	100.06%
Capaian	120.00	107.43	107.43	89.99	89.99	100.06	100.06

Sumber : Laporan Progress IKU Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa ; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No.	Jenis Pajak	Komposisi 2023		Komposisi 2024		Growth %
		Nominal	Persentase	Nominal	Persentase	
1	Industri Pengolahan	22.83 T	69.46%	25.02 T	69.37%	9.59
2	Perdagangan Besar dan Eceran	2.81 T	8.55%	3.3 T	9.15%	17.44
3	Administrasi Pemerintahan	2.62 T	7.97%	2.63 T	7.29%	0.38
4	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0.98 T	2.98%	1.12 T	3.11%	14.29
5	Konstruksi dan Real Estate	0.68 T	2.07%	0.51 T	1.41%	(25.00)
6	Pengangkutan dan Pergudangan	0.53 T	1.61%	0.7 T	1.94%	32.08
8	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.38 T	1.16%	0.37 T	1.03%	(2.63)
9	Lainnya	2.03 T	6.18%	2.42 T	6.71%	19.21
Total		32.87 T	100.00%	36.07 T	100.00%	9.74

Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebesar Rp36,07 triliun dengan capaian 100.06% dari target Rp36.05 triliun, realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 9.74% lebih baik dibandingkan tahun lalu.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	101.93	103.10	108.69	102.16	100.06

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 – 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 melemah dikarenakan dampak dari kenaikan cukai rokok yang merupakan komoditas utama dari Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu di Industri Pengolahan yang menyumbang 69.37% penerimaan pada tahun 2024. Hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan yang sudah di proyeksikan akan meningkat lebih dari 10% di tahun ini namun dikarenakan terdapat regulasi tersebut sehingga untuk industri Pengolahan tidak mengalami peningkatan sebagaimana mestinya.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.06%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi di Kanwil DJP Jawa Timur III yang semakin menguat. Beberapa hal juga melatarbelakangi membaiknya penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur III diantaranya dikarenakan mayoritas sektor-sektor usaha yang tumbuh positif.

- d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional Kantor Pusat	Realisasi Kanwil DJP Jawa Timur III
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	101.40%	100.06%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir desember 2024 masih belum mampu untuk melampaui standar Nasional Kantor Pusat dengan selisih angka 1.34%.

- e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III untuk menunjang capaian Kinerja penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Menyusun KEP Wajib Pajak Strategis per KPP
2. Menyusun daftar wajib pajak penentu penerimaan Kanwil
3. Melakukan Assesment Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) untuk peningkatan kualitas pengawasan
4. Menyusun DSP4 adjustment
5. Pengawasan penyelesaian SP2DK Outstanding (sesuai dafnom yang telah diturunkan ke KPP)
6. Pembentukan TIM PADP (Petugas Analisis Data Perpajakan)
7. Pembentukan TIM LO Monitoring dan Evaluasi KPP
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah I tahun 2023
9. Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak tingkat Kanwil
10. Menyusun daftar 10 KLU Prioritas per KPP

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal 2. Meningkatkan produksi LHA, LHPt, LHP2DK sesuai DSA dan DPP 3. Assesment usulan DPP KPP semester II 4. Penyelesaian Daftar Sasaran Analisis (DSA) 5. Penetapan dan pengamanan target PPM (STP, Dinamisasi, matching data) & PKM (SP2DK, LHPt, Pemeriksaan & Penagihan) 6. Pengawasan pembayaran WP strategis melalui dinamisasi pasal 25 7. Monitoring tindak lanjut DSP4 kolaboratif 8. Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Koordinasi Gabungan Jatim I,II,III 9. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan	2025

(1b-N)"IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas "

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

Realisasi capaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 sebesar 108.09% dari target 100%. Pertumbuhan pada Tahun 2023 dan 2024 memiliki pertumbuhan penerimaan yang menurun. Adapun IKU tersebut diukur menggunakan dua komponen yaitu pertumbuhan nasional dan realisasi komponen perubahan historis. Rincian pertumbuhan penerimaan pajak bruto Kanwil DJP Jawa Timur III setiap Triwulan yaitu:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	114.23%	110.54%	110.54%	109.32%	109.32%	108.09%	108.09%
Capaian	114.23	110.54	110.54	109.32	109.32	108.09	108.09

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Sehingga pada manual IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki capaian sebesar 110%. Data tersebut berasal dari perhitungan $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$.

b. Perbandingan antara realisasi tahun 2024 dengan kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	112.18	106.89	74.06	115.14	108.09

Upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur III untuk mencapai target yaitu :

1. Menyusun KEP Wajib Pajak Strategis per KPP
2. Menyusun daftar wajib pajak penentu penerimaan Kanwil
3. Melakukan Assesment Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) untuk peningkatan kualitas pengawasan
4. Menyusun DSP4 adjustment
5. Pengawasan penyelesaian SP2DK Outstanding (sesuai dafnom yang telah diturunkan ke KPP)
6. Pembentukan TIM PADP (Petugas Analisis Data Perpajakan)
7. Pembentukan TIM TPKC (Transfer Pricing Knowledge Center)
8. Pembentukan TIM LO Monitoring dan Evaluasi KPP
9. Melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah I, II, dan III Tahun 2024
10. Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak tingkat Kanwil
11. Penyampaian data historis penerimaan dan 3 pendekatan penghitungan prognosa penerimaan
12. Penyampaian booklet kinerja penerimaan bulanan
13. Melakukan Bimbingan teknis penyusunan prognosa penerimaa
14. Melakukan evaluasi penyusunan prognosa penerimaan secara bulanan

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal 2. Meningkatkan produksi LHA, LHPt, LHP2DK sesuai DSA dan DPP 3. Assesment usulan DPP KPP Semester I Tahun 2025 4. Penyelesaian Daftar Sasaran Analisis (DSA) 5. Penetapan dan pengamanan target PPM (STP, Dinamisasi, matching data) & PKM (SP2DK, LHPt, Pemeriksaan & Penagihan) 6. Pengawasan pembayaran WP strategis melalui dinamisasi pasal 25 7. Melakukan evaluasi penyusunan prognosa penerimaan secara bulanan 8. Melakukan Bimbingan teknis penyusunan prognosa penerimaan	2025

2. Sasaran Strategis 2 "Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi"

(2a-CP) "IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)"

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Kode IKU	Nama IKU	Formula IKU	
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Tujuan dari IKU tersebut yaitu memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan Pengawasan pembayaran masa. Berikut merupakan realisasi dan capaian selama tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	19.00%	46.00%	46.00%	74.00%	74.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	24.29%	50.56%	50.56%	69.81%	69.81%	100.06%	100.06%
Capaian	120.00	109.92	109.92	94.34	94.34	100.06	100.06

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tumbuh positif dengan capaian 100.06 dari target 100% di Triwulan IV Tahun 2024.

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120.00	102.92	102.16	93.23	100.06

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami Penurunan dari tahun 2021 – 2023 namun dapat kembali menyelesaikan tugas dengan capaian 100.06 di tahun 2024, adapun upaya upaya yang telah dilaksanakan Kanwil DJP Jawa Timur III adalah sebagai berikut :

1. Penentuan target penerimaan dengan sumber dari kegiatan PPM
2. Penerbitan STP & Data matching (FP, Bupot dll) yang optimal dan mempunyai detern efek
3. Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terkait penerimaan dari kegiatan PPM
4. Membentuk Liaison Officer sebagai mitra KPP untuk monitoring dan evaluasi

b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan aktivitas/kegiatan PPM (STP, <i>Data Matching</i> & dinamisasi) 2. Membuat mapping dan TL penerimaan pembayaran masa 3. Dinamisasi setoran PPh pasal 25 4. Melakukan pengawasan setoran rutin pada proyek strategis nasional seperti tol probowangi, tol kertosono kediri, bandara dhoho	2025

(2b-CP) "IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi"

a) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	91.36%	99.64%	99.64%	102.24%	102.24%	105.11%	105.11%
Capaian	120.00	120.00	120.00	113.60	113.60	105.11	105.11

Definisi IKU

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Unit Kerja	SPT Masuk	Target SPT	Realisasi IKU
NASIONAL	17.405.821	16.038.802	108.52%
220. Kanwil DJP Jawa Timur III	899.357	855.628	105.11%
622 - KPP Pratama Kediri	37.469	34.471	108.70%
623 - KPP Pratama Malang Selatan	50.436	50.069	100.73%
624 - KPP Pratama Pasuruan	76.841	67.477	113.88%
625 - KPP Pratama Probolinggo	76.564	73.917	103.58%
626 - KPP Pratama Jember	85.509	92.282	92.66%
627 - KPP Pratama Banyuwangi	108.007	96.727	111.66%
628 - KPP Pratama Batu	17.187	16.123	106.60%
629 - KPP Pratama Tulungagung	90.718	90.326	100.43%
651 - KPP Madya Malang	1.855	1.537	120.70%
652 - KPP Pratama Malang Utara	45.896	43.018	106.69%
653 - KPP Pratama Blitar	59.152	51.25	115.42%
654 - KPP Pratama Kepanjen	49.14	43.703	112.44%
655 - KPP Pratama Pare	97.038	96.488	100.57%
656 - KPP Pratama Situbondo	53.422	52.538	101.68%
657 - KPP Pratama Singosari	50.122	45.702	109.67%

Sumber : Aplikasi Mandor

Pada tahun 2024, realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 105.11% yaitu sebanyak 899.357 SPT dari total target sebesar 100% atau 855.628 SPT. Dibandingkan dengan realisasi IKU nasional yaitu dengan 108.52 Kanwil DJP Jawa Timur III berada 3.41 poin di bawah realisasi IKU Nasional.

b) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	99.40	101.80	108.48	109.96	105.11

Upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur III untuk mencapai target yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
2. Melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
3. Melakukan revisi atas penetapan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Lainnya.
3. Melakukan voice blast terhadap 10.000 Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan 2024.
4. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan Bidang PEP dan Bidang P2Humas berupa kegiatan persuasif seperti ajakan menyampaikan SPT Tahunan melalui berbagai media;
5. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan PEP dan P2 Humas serta KPP untuk menyiapkan kegiatan Pojok Pajak di tempat-tempat strategis;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap KPP terkait penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP secara periodik;
7. Mengimbuu KPP pada TW IV 2024 untuk melakukan pembenahan masterfile terkait WP NE;
8. Meminta konfirmasi dan penjelasan atas WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan kepada KPP terkait melalui Nota Dinas Kakanwil, serta memonitor secara berkala

c) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan data Wajib Pajak yang terdapat transaksi tapi tidak melaporkan SPT Tahunan termasuk Wajib Pajak yang masuk dalam daftar Wajib SPT. 2. Menghibau KPP Pratama dengan realisasi yang masih rendah untuk dapat melakukan tindakan percepatan realisasi IKU Kepatuhan SPT nya. 3. Monitoring realisasi IKU Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan secara berkala. 4. Mendorong KPP terkait penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP lebih awal 5. Bimbingan dan pengawasan penerbitan Imbauan/ Teguran/ Surat Tagihan Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan; 6. Optimalisasi pemanfaatan data Wajib Pajak yang terdapat transaksi tapi tidak melaporkan SPT Tahunan; 7. Mendorong KPP menindaklanjuti WP terindikasi NE dan DE sejak awal 	2025

3. Sasaran Strategis 3 "Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi"

(3a-CP) "IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	21.33%	34.72%	34.72%	35.10%	35.10%	100.13%	100.13%
Capaian	85.32	69.43	69.43	46.80	46.80	100.13	100.13

Pada tahun 2024 target yang di tetapkan untuk kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah 100% dan dapat dicapai Kanwil DJP Jawa Timur III dengan realisasi 100.13% sehingga mendapat capaian sebesar 100.13.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	94.83	107.61	110.68	108.60	100.13

Akar masalah dari penurunan realisasi di tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tindak lanjut saldo SP2DK outstanding yang masih belum optimal
2. Penyelesaian SP2 dan kegiatan penagihan belum optimal
3. Penyelesaian Bukperdik belum optimal
4. Kualitas pemeriksaan yang masih belum optimal

Sedangkan Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan PKM antara lain:

1. Penentuan target penerimaan dengan sumber dari kegiatan PKM
2. Melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terkait penerimaan dari kegiatan PKM
3. Mengarahkan KPP dalam penyusunan DPP untuk menggunakan data pemicu/penguji yang telah tersedia dalam Approweb untuk meningkatkan kepatuhan material WP bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajak
4. Melakukan pemetaan profil risiko WP berdasarkan Compliance Risk Management (CRM) dan Ability to Pay (ATP) serta data yang dapat dimanfaatkan baik data internal maupun eksternal
5. Melakukan penyusunan data WP yang sebagai Daftar Sasaran Analisis Bersama kegiatan Join Program DJP-DJBC
6. Memastikan tindak lanjut atas SP2DK outstanding dapat diselesaikan sesuai daftar nominatif yang telah diturunkan
7. Pembentukan TIM PADP (Petugas Analisis Data Perpajakan)

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan produktivitas penerbitan LHA, LHPT, SP2DK, LHP2DK yang berkualitas 2. Implementasi Join program dengan Pemda, DJBC (secondment) dan DJPK 3. Melaksanakan asistensi pemeriksaan TP & WP Grup 4. Melakukan Digital forensik saat pemeriksaan WP tertentu 5. Meningkatkan produktifitas LIIP (Lap Informasi Intelejen Perpajakan) dan LHA (Laporan Hasil Analisis) 6. Melakukan analisis atas profil potensi sektoral Karwil DJP Jatim III 7. Melakukan pengendalian mutu pemeriksaan 8. Melakukan uji petik mutu pengawasan 9. Asistensi penyelesaian tunggakan pemeriksaan 10. Akselerasi penyelesaian buperdik 11. Optimalisasi penilai pajak untuk KPP Madya atas penilaian Bisnis 12. Mengelola FGD tematik sektoral kegiatan penggalian potensi berdasarkan kluster KPP 13. Menetapkan batas minimum nilai potensi LHA menjadi 10 juta rupiah 14. Melakukan monev secara berkala terkait input komitmen pada aplikasi DRM	2025

4. Sasaran Strategis 4 " Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif"

(4a-CP) "IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	74.00%	74.00%
Realisasi	60.28%	86.75%	86.75%	88.71%	88.71%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

IKU ini bertujuan untuk memantau perilaku pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak setelah dilaksanakannya kegiatan edukasi dan penyuluhan. Dengan peningkatan penyuluhan dan humas akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara. IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dihitung menggunakan rumus berikut: $IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada Tahun 2024 adalah sebesar 88.80% dari total target 74.00% sehingga menghasilkan indeks capaian 120%. Proporsi capaian yaitu 18.50% kegiatan penyuluhan, 42.18% bayar, dan 28.12% lapor.

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	108.42%	80.40%	79.90%	83.98%	88.80%

Upaya yang telah dilakukan Kanwil DJP Jawa Timur III untuk mencapai target yaitu :

1. Melakukan monitoring realisasi kegiatan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III pada Aplikasi SISULUH sesuai Rencana Kerja;
2. Melakukan monitoring realisasi IKU Efektivitas Penyuluhan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III pada Aplikasi MANDOR DJP;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan di KPP dan KP2KP dengan metode kunjungan langsung dan melakukan wawancara dan secara daring;
4. Melaksanakan evaluasi kegiatan penyuluhan dalam bentuk Forum Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
5. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Tim Penyuluh Pajak melalui Workshop Penyuluhan tahun 2024;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi terhadap Wajib Pajak Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) baik Kolaboratif maupun mandiri yang dilakukan pada tahun 2024.

- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memonitoring capaian IKU Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan pada Aplikasi MANDOR secara periodik (dua minggu); 2. Mengadakan Bimbingan Teknis IKU Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan kepada Tim Penyuluh di KPP/KP2KP; 3. Melaksanakan monev pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Penyuluhan di KPP/KP2KP periode Triwulan IV Tahun 2024; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan treatment edukasi terhadap Wajib Pajak Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) baik Kolaboratif dan Mandiri Tahun 2024;	2025

(4b-N) "IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan"

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	6.01%	12.29%	12.29%	18.00%	18.00%	107.33%	107.33%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	107.33	107.33

Indikator keberhasilan pencapaian target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

Realisasi Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan dan kehumasan Tahun 2024 adalah sebesar 107.33% dari total target 100.00% sehingga menghasilkan indeks capaian 107.33.

- b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	86.69	85.24	90.38	83.37	107.33

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Pada tingkat Kanwil, melaksanakan satu jenis survei yaitu Survei Efektivitas Penyuluhan dengan responden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan langsung secara aktif dengan lancar dan akuntabel untuk Triwulan I s.d Triwulan III;
2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan, Survei Efektivitas Kehumasan, dan Survei Efektivitas Penyuluhan di KPP, khususnya memastikan jumlah minimum responden survei terpenuhi;
3. Memastikan bahwa survei yang dilaksanakan di KPP dan Kanwil DJP dilaksanakan dengan profesional dan berintegritas;
4. Menyampaikan longlist responden survey untuk Triwulan IV kepada Dit.P2Humas

- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pada tingkat Kanwil, melaksanakan Survei Efektivitas Penyuluhan dengan responden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan langsung secara aktif dengan lancar dan akuntabel;	2025
2. Melakukan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan, Survei Efektivitas Kehumasan, dan Survei Efektivitas Penyuluhan di KPP, khususnya memastikan jumlah minimum responden survei terpenuhi;	
3. Memastikan bahwa survei yang dilaksanakan di KPP dan Kanwil DJP dilaksanakan dengan profesional dan berintegritas;	

5. Sasaran Strategis 5 "Pengawasan pembayaran masa yang efektif"

(5a-CP) "IKU Persentase pengawasan pembayaran masa"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	120.00%	115.98%	115.98%	117.27%	117.27%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Indeks Capaian IKU presentase pengawasan pembayaran masa Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2024 adalah 120% (realisasi 120% dengan trajectory 90%).

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100.00%	107.55%	119.00%	120.00%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Mengawasi penerbitan STP pada KPP
2. Himbauan kepada KPP untuk segera menindaklanjuti data pemicu, data penguji, serta hasil pencarian data mandiri dalam bentuk LHPt atau SP2DK.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut DSE.
5. Rakorda (berupa kegiatan evaluasi, pembahasan dan diskusi) tentang strategi pengamanan target penerimaan yang optimal dengan meningkatkan kegiatan pengawasan pembayaran masa sektoral;
6. Evaluasi kinerja individual AR tentang pengawasan pembayaran masa (STP, data matching, dinamisasi peningkatan angsuran PPh 25);
7. Pemantauan dan evaluasi kinerja KPP berdasarkan cluster yaitu barat, tengah, timur, dan madya;
8. Distribusi daftar nominatif dinamisasi angsuran PPh 25 kepada KPP;
9. Pemantauan aktivitas Pengawasan PPM dalam aplikasi Mandor secara rutin;
10. Pemantauan evaluasi kinerja pengawasan pembayaran masa dalam kegiatan Rakorda/Rakorgab.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Monitoring dan evaluasi penerbitan STP pada KPP secara berkala. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas DSE pada KPP secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut Data Pemicu, Data Penguji dan data mandiri pada KPP secara berkala. 4. Pemantauan aktivitas Pengawasan PPM dalam aplikasi Mandor secara rutin; 5. Pemantauan evaluasi kinerja pengawasan pembayaran masa dalam kegiatan Rakorda/Rakorgab; 6. Kegiatan pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak Sektor Prioritas Nasional dan Prioritas Regional Kanwil; 7. Tindak lanjut atas data temuan BPK tentang STP atas pajak yang kurang dibayar.	2025

6. Sasaran Strategis 6 "Pengujian kepatuhan material yang efektif"

(6a-CP) "IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	138.40%	104.06%	104.06%	110.64%	110.64%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00	104.06	104.06	110.64	110.64	120.00	120.00

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah) (Bobot 50%).

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun 2024 adalah sebesar 120.00% dari total target 100.00% sehingga menghasilkan indeks capaian 120.00

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	101.83%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan nilai minimal realisasi dan nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan.
 2. Melakukan bimbingan serta monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif terhadap kinerja tim pengawasan kepatuhan sektoral
 3. Melaksanakan Bimtek AR Kewilayahan terkait penggalian potensi perpajakan yang bersinergi dengan Penilai dan Bidang Data Potensi Pengawasan Perpajakan
 4. Melakukan pengawasan kepada KPP atas tindak lanjut SP2DK Outstanding.
 5. Melaksanakan kegiatan Kolaboratif dengan KPP di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II dalam menentukan dan menyusun DPP Kolaboratif
 6. Melakukan penambahan DPP dari data CK1 dan data WP yg masih menggunakan tarif PP23 melebihi batas ketentuan, data pembelian Faktur Pajak NPWP 000, Data dari instansi lain, .
 7. Menetapkan batas waktu penyampaian kepada KPP dalam penyusunan DPP, sehingga Kanwil memiliki waktu untuk mengecek kualitas usulan DPP.
 8. Pemantauan dan evaluasi kinerja KPP berdasarkan klaster yaitu Barat, Tengah, Timur, dan Madya
 9. Memberikan rekomendasi/adjustment penambahan WP terpilih untuk dimasukkan dalam DPP semester I dan II;
 10. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi dalam pengendalian mutu pengawasan atas hasil penelitian/analisis Account Representative
 11. Menetapkan target angka mutlak P4DK (LHPt dan LHP2DK) WP Strategis untuk tiap AR di KPP Madya dan Pratama
 12. Berkoordinasi dengan KPP yang IKU P4DK-nya masih belum optimal secara intens serta meminta penjelasan atas kendala yang dihadapi
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan KPP di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III dalam menentukan dan menyusun DPP Kolaboratif	2025
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.	
3. Melakukan penggalian potensi dari berbagai sumber sebagai bahan DPP/pemutakhiran DPP	

(6b-N) "IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	111.30%	111.30%	77.09%	77.09%	100.82%	100.82%
Capaian	120.00	111.30	111.30	77.09	77.09	100.82	100.82

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan rata-rata capaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (30%), kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (40%), dan Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (30%).

Realiasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100.82% dari Target 100% sehingga indeks capaian menjadi sebesar 100.82

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	119.01%	100.82%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Menyusun KEP Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jawa Timur III;
2. Melakukan Rapat Pembahasan Bahan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan;
3. Melakukan Rapat Pembahasan Hasil DSP4 Adjustment Kanwil Semester I dan II Tahun 2024;
4. Melakukan Rapat Pembahasan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun Anggaran 2024;
5. Melakukan Rapat Pembahasan Reviu Kanwil terhadap Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP;
6. Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan kolaborasi internal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi Komite Kepatuhan KPP; 3. Meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Komite Kepatuhan KPP lebih awal; 4. Melakukan <i>reviu/assessment</i> atas pengisian Laporan Komite Kepatuhan KPP dan memberikan rekomendasi aksi untuk penyelesaian rencana aksi yang ditetapkan Komite Kepatuhan KPP; 5. Menyusun, menetapkan, dan melakukan monitoring atas langkah-langkah percepatan / <i>Quick Win</i> Kanwil berdasarkan usulan dari KPP 6. Melakukan monitoring atas langkah-langkah percepatan / <i>Quick Win</i> Kanwil KPDJP dan KPP 7. Lebih fokus dalam menyusun DSPP Semester I Tahun 2025 agar realisasi bahan baku pemeriksaan terhadap DSPP dapat lebih optimal	2025

7. Sasaran Strategis 7 "Penegakan hukum yang efektif"

(7a-CP)"IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	110.65%	115.21%	115.21%	116.96%	116.96%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)*
5. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian terdiri dari jumlah Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%) dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%).

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120% dengan target sebesar 100%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	110.67%	120.00%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Mengadakan IHT Mandiri / mengikuti IHT yang diadakan kantor pusat mengenai Time Management Pemeriksaan
2. melakukan pendampingan dan bimbingan kepada Kasi P3 dan pelaksananya mengenai permasalahan sistem yang dihadapi
3. Melakukan pengawasan dan monev kinerja baik atas kinerja tahun lalu maupun kinerja bulanan
4. Melakukan Bedah Tunggakan untuk membantu memberi solusi dalam percepatan penyelesaian tunggakan

5. Melakukan bimbingan serta monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif terhadap kegiatan penilaian.
6. Melaksanakan Bimtek Petugas Penilai dan Bimtek Penilaian terkait penggalian potensi perpajakan.
7. Mendistribusikan permintaan bantuan penilaian kepada Tim Penilai Kanwil DJP Jawa Timur III dengan tetap melibatkan KPP terkait.
8. Melaksanakan kegiatan Kolaboratif dengan KPP di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III dalam penyelesaian kegiatan penilaian.
9. IHT Desentralisasi fungsi penilaian dalam kegiatan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa didampingi fungsional penilai

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan koordinasi dengan semua KPP untuk keseragaman langkah dalam pemenuhan bahan baku pemeriksaan 2. Memberikan asistensi sekaligus membantu solusi penyelesaian percepatan tunggakan, manajemen restitusi, dan penyelesaian permasalahan sistem 3. Melaksanakan kegiatan Kolaboratif dengan KPP di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III dalam penyelesaian kegiatan penilaian. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Persentase Penyelesaian Penilaian."	2025

(7b-CP) "IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20.00%	40.00%	40.00%	60.00%	60.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	51.91%	71.30%	71.30%	81.00%	81.00%	115.17%	115.17%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu

Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Realisasi Kanwil DJP Jawa Timur III pada tahun 2024 sebesar 115.17% dari target 90% sehingga mendapatkan realisasi sebesar 120.00.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	-	-	115.00%	98.74%	115.17%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Melaksanakan Asistensi dan Bimtek Penagihan
2. Asistensi Daftar Sasaran Prioritas Pencairan Piutang Pajak tahun 2024
3. Melakukan koordinasi joint collection dengan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan Kanwil DJBC Jawa Timur.
4. Menyampaikan kepada WP terperiksa tentang haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan cfm pasal 8 (3) UU KUP
5. Menyelesaikan konsep Penyidikan dan gelar perkara penyidikan yang sudah cukup bukti
6. Rapat Kerja Bersama dengan KPP dalam rangka kolaborasi dan usulan bukti permulaan yang berkualitas
7. Melaksanakan Forum Penagihan Kanwil Jawa Timur Bersatu (Jatim I, II, dan III)

8. Melaksanakan kegiatan asistensi DSPC secara berkelanjutan, sita serentak, lelang serentak, dan blokir serentak.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan kegiatan asistensi DSPC secara berkelanjutan dan lelang serentak.. 2. Melaksanakan Rapat kerja bersama dengan KPP secara periodik untuk meningkatkan kolaborasi dengan PPNS 3. Melakukan bimbingan ke KPP dalam rangka usulan bukti pemulaan yang berkualitas	2025

8. Sasaran Strategis 8 "Penyelesaian keberatan dan non keberatan yang optimal" (8a-CP)"IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%
Realisasi	99.83%	99.86%	99.86%	99.45%	99.45%	99.19%	99.19%
Capaian	115.41	115.45	115.45	114.97	114.97	114.67	114.67

Tujuan dari Pengukuran IKU ini yaitu agar terciptanya kinerja penyelesaian keberatan dan non keberatan yang semakin cepatmaka dari itu dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
2. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

Capaian dari Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu 114.67 dengan target 86.50% dan Realisasi sebesar 99.19%, dikarenakan ada beberapa 4 Berkas Keberatan yang memerlukan waktu lebih demi mendapatkan keputusan yang dapat membantu pada proses Banding dilaksanakan.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	100.00%	81.90%	93.92%	86.09%	99.19%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Menyelesaikan Keberatan dan Non Keberatan dalam tahapan: pembahasan ditingkat Tim Penelaah Keberatan, pembahasan di tingkat Tim Penelaah Keberatan dengan Unit Pemilik Risiko dan melakukan bedah kasus (sharing) seperlunya.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penyelesaian Keberatan dan jatuh temponya.
3. Selalu mengupdate progress penyelesaian pengajuan keberatan dan non keberatan di Database Bidang KBP dan sesegera mungkin close Case Management SIDJP apabila telah terbit SK Keberatan dan Non Keberatan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat validitas dan keakuratan Database Bidang KBP.

c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengkoordinasikan penyelesaian Keberatan paling lambat 10 bulan sejak tanggal diterima LPAD dan Non Keberatan paling lambat 5 bulan sejak tanggal diterima LPAD 2. Memanfaatkan Database Bidang KBP untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan, serta memastikan Case Management close apabila telah terbit SK	2025

(8b-N) "IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif"

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%	63.00%
Realisasi	85.28%	96.89%	96.89%	90.40%	90.40%	91.27%	91.27%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Tujuan dari Pengukuran IKU ini yaitu agar Terciptanya kinerja penyelesaian keberatan dan non keberatan yang semakin berkualitas maka dari itu Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
2. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	75.52%	81.41%	69.70%	120.00%	91.27%

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target yaitu:

1. Membuat Kompilasi Sengketa Keberatan dan Non Keberatan, kemudian meneruskan data tersebut ke KPP
 2. Aktif menyampaikan data statistik permohonan dan Case Guidance DKB ke KPP dalam forum agar KPP tidak salah dalam membuat produk hukum, sehingga wajib pajak tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya.
- c. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membuat Kompilasi Sengketa Keberatan dan Non Keberatan 2. Menyusun bahan data statistik permohonan untuk disampaikan dalam forum yang diikuti oleh KPP	2025

9. Sasaran Strategis 9 "Data dan Informasi yang berkualitas"

(9a-N) "IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan "

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Capaian IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
	Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	
Realisasi	18.17%	76.88%	76.88%	122.09%	122.09%	116.50%	116.50%	Max/TLK
Capaian	90.85	120.00	120.00	120.00	120.00	116.50	116.50	

Capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 116.50 dengan target sebesar 100% dan realisasai sebesar 116.50%.

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	120.00%	120.00%	120.00%	78.43%	116.50%

Pada tahun 2024 tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Penentuan Target penyediaan data potensi perpajakan per pegawai (AR dan Pelaksana KP2KP)

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan aplikasi MATOA pada seluruh KPP

b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Membangun kolaborasi dan sinergi yang solid dengan pemerintah daerah setempat. 2. Monitoring pelaksanaan dan perekaman KPDL pada aplikasi Mandor menu IKU KPDL SE-11 2024. 3. Monitoring pelaksanaan dan perekaman yang dilakukan oleh AR melalui aplikasi MANDOR.	2025

(9b-N) "IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP"

Indikator kinerja utama persentase penghimpunan data regional dari ILAP bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPK dan Pemerintah Daerah, serta bentuk kerja sama lainnya.

Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KANWIL DJP JAWA TIMUR III	9 Data dan Informasi yang berkualitas							
	9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%	Max/TLK
Realisasi	47.14%	63.76%	63.76%	72.84%	72.84%	83.40%	83.40%	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120, dengan target sebesar 55% dan realisasai sebesar 83.40%.

a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	120.00%	120.00%	113.00%	83.40%

Pada tahun 2024 tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

1. Membuat ND-2521/WPJ.12/2024 tentang Perubahan Penetapan Target Wajib Data dan Elemen Data terkait IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024.
2. Menyampaikan surat permintaan data kepada pemda yang telah melaksanakan PKS dengan format terbaru.
3. Menyampaikan surat permintaan data kepada pemda yang belum melaksanakan PKS sesuai PP31 dan PMK-168 dengan format terbaru.
4. Melakukan koordinasi dengan pemda terkait data yang tersedia dan unit kerja pengampu data.

5. Melakukan penawaran perluasan Perjanjian Kerja Sama OP4D dalam rangka memperluas basis pertukaran data terhadap pemda yang belum melaksanakan PKS OP4D.

b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan koordinasi dengan KPP terkait tindak lanjut penyampaian data sesuai PKS dan pemenuhan data sesuai PP 31/2012 2. Menyampaikan data yang perlu dilakukan klarifikasi ke pemerintah daerah terkait 3. Mengirimkan surat permintaan data yang sesuai kepada pemerintah daerah di lingkungan Karwil DJP Jawa Timur III (Follow Up) 4. Berkoordinasi dengan KPP sebagai salah satu pengampu IKU agar berkomunikasi secara langsung dengan pemda terkait	2025

10. Sasaran Strategis 10 "Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif"

(10a-N) "IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM"

IKU ini mengatur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 aspek yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III adalah sebagai berikut:

KANWIL DJP JAWA TIMUR III								
10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								
10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM								
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/IKP
Target	15.00	45.00	45.00	75.00	75.00	90.00	90.00	Max/TLK
Realisasi	87.73	120.00	120.00	103.32	103.32	114.93	114.93	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

Target pada tahun 2024 sebesar 90 dengan realisasi sebesar 114,93 sehingga total capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III adalah sebesar 120.

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	100.00	93.46	96.42%	100.00%	114.93

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Tingkat kualitas kompetensi SDM adalah antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan mengingatkan pegawai untuk melaksanakan jam pelatihan

2. Memonitoring kesiapan pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi

b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Melanjutkan berbagai program yang telah dilakukan sejak awal tahun sehingga para pegawai dapat meningkatkan kompetensinya masing-masing	2025

(10b-N) "IKU Indeks Penilaian Integritas Unit"

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

1. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;
2. Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;
3. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KANWIL DJP JAWA TIMUR III		10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP	
Target	-	-	-	85.00%	85.00%	100.00%	100.00%		
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	114.14%	114.14%	Max/TLK	
Capaian	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	117.65	117.65	114.14	114.14		

Realisasi Survei Penilaian Integritas Unit pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024 adalah sebesar 114,14% dari target Q4 sebesar 100,00% sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 114,14%.

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	120.00%	116.62	114.00	111.18	114.14

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

1. Mengirimkan nota dinas penyampaian longlist responden kepada KITSDA
2. Mengadakan kegiatan sosialisasi antara lain sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi untuk menjamin keberlangsungan integritas unit baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu melanjutkan berbagai program yang telah disusun agar keberlangsungan integritas unit tetap berjalan dengan baik dan mempersiapkan untuk keberhasilan ZI-WBBM di tahun 2026 dari tahun 2025.

- b. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Melanjutkan berbagai program yang telah disusun agar keberlangsungan integritas unit tetap berjalan dengan baik dan mempersiapkan untuk Keberhasilan ZI-WBBM di tahun 2026 dari tahun 2025	2025

(10c-N) "IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko "

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko diperoleh dari jumlah Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Adapun Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

KANWIL DJP JAWA TIMUR		10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif						
III		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00	90.00	Max/TLK
Realisasi	25.81	60.17	60.17	88.51	88.51	98.01	98.01	
Capaian	112.22	120.00	120.00	120.00	120.00	108.90	108.90	

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun 2024 adalah sebesar 98.01 dari target Triwulan IV sebesar 90 sehingga menghasilkan indeks capaian sebesar 108.90

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100.00%	100.00%	100.00%	99.90%	98.01%

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam pengumpulan penjelasan progres IKU, matriks tindak lanjut, LPKR, dan pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko disertai dengan bukti pendukung relevan
- Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam melakukan perhitungan, kompilasi data dan menyusun Laporan NKO untuk dibahas dalam rapat DKO
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan DKO dengan pemberian umpan balik oleh peserta rapat

- b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi penggunaan media Teams sebagai alat bantu dalam aktivitas komunikasi dengan para pemilik proses bisnis, pemantauan, dan pelaporan data serta pengumpulan dokumen bukti pendukung 2. Melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko berdasarkan Adendum II 3. Kanwil selaku UPK-Two terus melakukan pravalidasi dokumen kelengkapan DKRO UPK-Three dibawahnya agar capaian unit terhadap IKU ini dapat optimal	2025

11. Sasaran Strategis 11 "Pengelolaan keuangan yang akuntabel"

(11a-CP)"IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran"

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran

(DIPA). DIPA harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Realisasi anggaran tahun 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III adalah sebagai berikut:

KANWIL DJP JAWA TIMUR III	11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Max/TLK
Realisasi	105.00	105.09	105.09	120.00	120.00	120.00	120.00	
Capaian	105.00	105.09	105.09	120.00	120.00	120.00	120.00	

Capaian pada tahun 2024 sebesar 120%, dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 120%. Formula IKU untuk Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

$$Q1, Q2, Q3 = 100\% \times IKPA$$

$$Q4 = (P1\% \times IKPA + P2\% \times SMART)$$

- a. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95.17%	97.79%	96.73%	98.17	120.00

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana kerja bidang dan bagian dalam rangka menyusun rencana penarikan dana bulanan dan memproyeksikan apakah rencana kerja tersebut sudah memenuhi target penyerapan atau belum;
2. Menginventarisir pekerjaan-pekerjaan yang pengadaannya melalui mekanisme kontrak untuk menjaga Indikator Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP;
3. Meningkatkan penggunaan KKP dalam rangka mendukung transformasi belanja pemerintah cashless.

- b. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menginventarisir rencana kerja bidang dan bagian untuk triwulan I; 2. Meningkatkan komunikasi dengan bidang dan bagian dalam rangka menjaga komitmen bidang dan bagian untuk merealisasikan rencana kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 3. Meningkatkan koordinasi para pejabat pengelola keuangan agar tindak lanjut rencana kerja bidang dan bagian dapat berjalan dengan lancar.	2025

B. Realisasi Anggaran

Pada awal tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Timur III mendapat pagu anggaran sebesar Rp12.379.519.000. Pada tahun berjalan, terdapat beberapa revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran tersebut. Revisi anggaran yang pertama dilakukan pada bulan April melalui mekanisme Revisi Anggaran Kewenangan DJA yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran sebesar Rp455.986.000 menjadi Rp12.835.505.000, penambahan pagu anggaran tersebut terkait dengan belanja modal dan belanja barang berupa daya dan jasa (listrik, telepon, air). Selanjutnya, pada bulan November terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran sebesar Rp438.999.000 menjadi Rp13.274.504.000, penambahan pagu anggaran tersebut terkait belanja perjalanan dinas yang tersebar pada beberapa rincian output.

Setelah mengalami beberapa kali revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah, pagu anggaran Kanwil DJP Jawa Timur III pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp13.274.504.000. Kanwil DJP Jawa Timur III berhasil menyerap anggaran sebesar 98,39% atau sebesar Rp13.007.353.192.

Pada tahun 2024, terdapat efisiensi anggaran berupa efisiensi biaya perjalanan dinas jabatan dan efisiensi penggantian BBM. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor ND-577/WPJ.12/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Tahun Anggaran diatur diantaranya mengenai biaya penginapan, uang harian, dan biaya taksi/kendaraan. Sedangkan terkait dengan efisiensi penggantian BBM sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor ND-2184/WPJ.12.2022 tanggal 7 September 2022 hal Pemberitahuan Kebijakan Penggantian/Reimburse BBM pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang mana dalam nota dinas tersebut diatur mengenai maksimal rupiah yang dapat dilakukan penggantian berdasarkan tujuan pelaksanaan tugas dan/atau jarak tempuh yang dilaksanakan.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya manusia dan anggaran harus dikelola berdasarkan asas efektif, efisien, dan *output-oriented*. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pegawai didukung oleh komponen anggaran. Dalam hal ini, peran anggaran menjadi dasar keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka dari itu, apabila ingin melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, maka terlebih dahulu harus melakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran.

Sama halnya dengan tahun 2023, di tahun 2024 juga masih terdapat efisiensi penggunaan anggaran berupa efisiensi biaya perjalanan dinas jabatan dan efisiensi penggantian bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor ND-577/WPJ.12/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Efisiensi Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Tahun

Anggaran 2023 yang mengatur ketentuan mengenai biaya penginapan, uang harian, dan biaya taksi/kendaraan. Sedangkan terkait dengan efisiensi penggantian BBM sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor ND-2184/WPJ.12.2022 tanggal 7 September 2022 hal Pemberitahuan Kebijakan Penggantian/*Reimburse* BBM pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang mana dalam nota dinas tersebut mengatur ketentuan mengenai maksimal rupiah yang dapat dilakukan penggantian berdasarkan tujuan pelaksanaan tugas dan/atau jarak tempuh yang dilaksanakan. Dapat disampaikan bahwa nominal maksimal rupiah yang dapat dilakukan penggantian BBM sebagaimana tabel berikut:

Jarak Tempuh (Pergi – Pulang)	Tujuan KPP	Maksimal Rupiah (Rp)
Dalam kota	Kota Malang	50.000
0 – 25 km	Kota Batu	50.000
	Singosari	
26 – 50 km	Kepanjen	100.000
51 – 100 km	-	150.000
101 – 150 km	Pasuruan	300.000
	Blitar	
151 – 200 km	Kediri	350.000
	Pare	
	Surabaya	
	Sidoarjo	
201 – 250 km	Tulungagung	500.000
	Probolinggo	
251 – 400 km	Jember	700.000
	Situbondo	
401 – 650 km	Banyuwangi	1.200.000

D. Kinerja Lain-lain

Selain program unggulan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III juga memiliki sejumlah kegiatan yang mendukung kelancaran administrasi perpajakan dan pencapaian tujuan perpajakan yang optimal, antara lain :

1. Menyusun Keputusan Kepala Kanwil tentang Wajib Pajak Strategis per Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta menyusun daftar wajib pajak penentu penerimaan pada kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
2. Penyampaian data historis penerimaan dan pendekatan penghitungan prognosa penerimaan.

3. Melakukan *assesment* Daftar Prioritas Pengawasan untuk peningkatan kualitas pengawasan.
4. Melakukan pengawasan penyelesaian SP2DK *Outstanding* sesuai daftar nominatif yang telah diturunkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
5. Pembentukan tim Petugas Analisis Data Perpajakan, *Transfer Pricing Knowledge Center*, dan *Liaison Office* Monitoring dan Evaluasi.
6. Melaksanakan rapat koordinasi daerah, monitoring dan evaluasi, bimbingan teknis, dan asistensi.
7. Mengadakan kegiatan persuasif seperti ajakan menyampaikan SPT Tahunan melalui berbagai media dan Pojok Pajak di tempat-tempat strategis.
8. Melakukan pemetaan profil risiko wajib pajak berdasarkan *Compliance Risk Management* dan *Ability to Pay*.
9. Melakukan penyusunan data wajib pajak sebagai Daftar Sasaran Besar kegiatan *Join Program* DJP-DJBC.
10. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah setempat.
11. Melaksanakan kegiatan *Join Program* Bersama Unit Eselon I Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur.
12. Memaksimalkan kegiatan *In House Training* terkait pelaksanaan *assessment center* dan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2024.
13. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan terhadap wajib pajak, antara lain :

No	Tanggal Kegiatan	Jenis Kegiatan	Judul Kegiatan/Surat	Tempat Kegiatan	Peserta
1	05 Januari 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak (Relawan Pajak)	Pembukaan dan Pelatihan Relawan Pajak Batch VI FEB Universitas Islam Malang	Universitas Islam Malang	Relawan Pajak Unisma
2	16 Januari 2024	Edukasi kepada WP OP	Sosialisasi PMK 136 Tahun 2023 kepada INI Jawa Timur dan Pengurus Wilayah IPPAT Jawa Timur	Zoom meetings	INI Jawa Timur dan Pengurus wilayah IPPAT Jawa Timur
3	17 Januari 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Rakerda Badan Pimpinan Daerah Jawa Timur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia	Museum Panji	Anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan

					Pimpinan Daerah Jawa Timur
4	19 Januari 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: Ada yang Baru Nih, TER PPh Pasal 21	Lobby Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
5	07 Februari 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Sosialisasi PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023	Ruang Rapat Gaperoma	Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma)
6	13 Februari 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Focus Group Discussion (FGD) dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) terkait kebutuhan SDM perusahaan atas profil lulusan Akuntansi	Universitas Muhammadiyah Malang	Civitas Akademika UnMuh
7	19 Februari 2024	Kegiatan Tidak Langsung 1 Arah (Siniar)	Bincang Pajak Vol. 1: Kurang Bayar Pajak pada SPT Tahunan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	Civitas Akademika UB
8	19 Februari 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: Tarif Efektif Rata-Rata, Apa Nih?	Studio Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
9	21 Februari 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak (Relawan Pajak)	Pendalaman materi pengisian SPT Tahunan bagi Relawan Pajak (Renjani) Universitas Negeri Malang	Online melalui Zoom Meeting	Relawan Pajak UM
10	28 Februari 2024	Edukasi kepada WP Badan Non PKP	Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Perusahaan	Ballroom Kantor OJK Malang	Wajib Pajak Badan prominent

11	29 Februari 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP dan WP Badan Non PKP	APINDO	Bata Merah, Batu	Wajib Pajak Orang Pribadi & Badan
12	05 Maret 2024	Edukasi kepada WP OP	Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya	hybrid	INI Malang Raya
13	07 Maret 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Webinar Kemenkeu Corporate Open Class (KCOC) dengan Tema Pemberlakuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan CTAS Coretax System Kolaborasi bersama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang	Online melalui Zoom Meetings dan Live Youtube via Balai Diklat Keuangan Malang	Wajib Pajak Kanwil DJP Jatim III
14	07 Maret 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Webinar Kemenkeu Corporate Open Class (KCOC) dengan Tema Pemberlakuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan CTAS Coretax System Kolaborasi bersama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang	Online melalui Zoom Meetings dan Live Youtube via Balai Diklat Keuangan Malang	Wajib Pajak Kanwil DJP Jatim III
15	19 Maret 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	Radio Talkshow: Ga Lapor Pajak, Rugi Dong!	Radio Cityguide	pendengar radio
16	20 Maret 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Sosialisasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak	Aula Gedung A Balai Diklat Keuangan Malang	perwakilan siswa dan guru bimbingan konseling di SMA/SMK

17	21 Maret 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Sosialisasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak	Aula Gedung A Balai Diklat Keuangan Malang	Negeri serta SMA/SMK Swasta di wilayah Kota Malang
18	22 Maret 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: Laport SPT, Kita Bikin Romantis	Studio Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
19	27 Maret 2024	Kelas Pajak	Kelas Pajak: Coretax, NIK Menjadi NPWP, dan SPT Tahunan Orang Pribadi	Ruang Rapat Kanwil DJP Jatim III	open participant
20	03 April 2024	Kegiatan Tidak Langsung 1 Arah (Sinjar)	Podcast: Yang Baru dari DJP, Coretax	Tribun Jatim	Kawan Tribun
21	04 April 2024	Kelas Pajak	Sosialisasi PMK 7/2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (PPN DTP)	Studio Kanwil DJP Jatim III	INI IPPAT Jawa Timur
22	23 April 2024	Kelas Pajak	Sosialisasi Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan dan Implementasi Coretax	Aula KPP Malang Utara	Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Malang & Kabupaten Malang
23	23 April 2024	Kelas Pajak	Sosialisasi PMK no. 07 tahun 2024 mengenai PPN atas Penyerahan Rumah Tapak & Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah	Ruang Rapat Kanwil DJP Jatim III	REI Jawa Timur

24	23 April 2024	Kelas Pajak	Sosialisasi PMK no. 07 tahun 2024 mengenai PPN atas Penyerahan Rumah Tapak & Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah	Ruang Rapat Kanwil DJP Jatim III	REI Jawa Timur
25	26 April 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: Lapor SPT, Oi!	Studio Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
26	02 Mei 2024	Kelas Pajak	Sidang Pleno Dewan Profesor Universitas Brawijaya (DPUB) Diskusi Tentang Pajak pasca PTNBH UB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB	anggota Dewan Profesor Universitas Brawijaya (DPUB)
27	17 Mei 2024	Kelas Pajak	Peningkatan Kompetensi siswa bidang Perpajakan	Aula Kanwil DJP Jatim III	siswa SMK Negeri 12 Malang
28	21 Mei 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: NIK Jadi NPWP	Studio Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
29	22 Mei 2024	Kelas Pajak	Peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai Nadi Perekonomian Nasional	Lobby Kanwil DJP Jatim III	mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)
30	28 Mei 2024	Kelas Pajak	BDS: Belajar Jualan Pakai Live Tiktok	Aula Kanwil DJP Jatim III	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
31	31 Mei 2024	Kelas Pajak	Seminar dan Kuliah Tamu Perpajakan: Pajak dalam Revolusi Industri 4.0	Universitas Ma Chung	mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

					Bisnis Universitas Ma Chung
32	03 Juni 2024	Kelas Pajak	Diskusi Perkara Isu Khusus (Diskursus): Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 Pasca Kenaikan PPN 12 Persen	Studio Kanwil DJP Jatim III	Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
33	19 Juni 2024	Kelas Pajak	Webinar: Peran Gen-Z dalam Menghadapi Tantangan Pajak di Era Ekonomi Digital	Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga (Zoom Meeting)	Mahasiswa/i Universitas Panca Marga
34	20 Juni 2024	Kegiatan Tidak Langsung 1 Arah (Siniar)	Bincang Pajak Vol. 2: Regulasi Pajak Kripto	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	FEB UB khususnya, masyarakat pada umumnya
35	23/06/202 4 - 26/06/20 24	Bimbingan kepada KPP	Workshop Penyuluhan Tahun 2024	KPP Pratama Batu	Fungsional Penyuluh, Pelaksana KP2KP dan Pelaksana Seksi Pelayanan sebagai Tim Edukasi
36	24 Juli 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Hibah Berupa Uang Yang Dievaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa	Hotel Batu Suki	508 lembaga calon penerima hibah Pemerintah Provinsi Jawa

			Timur Tahun Anggaran 2024		Timur Bidang Pendidikan
37	25 Juli 2024	Edukasi kepada WP Badan Non PKP	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku BUMDESMA se-Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2024		BUMDESMA se- Kab. Lamongan
38	26 Juli 2024	Kegiatan Tidak Langsung Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: NPWP 16 Digit	Studio Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
39	26 Juli 2024	Edukasi kepada WP Badan Non PKP	Bimbingan Teknis Peningkatan Administrasi Tata Pengelolaan Keuangan	Royal Orchid Hotel - Kota Batu	Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
40	29 Juli 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Kupas Tuntas TER pada PPh 21: Perhitungan, Bukti Potong, Penyetoran, dan Pelaporan	Online via Zoom meeting	mahasiswa Politeknik Negeri Malang dan umum
41	31 Juli 2024	Edukasi kepada WP Badan Non PKP	Edukasi perpajakan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis bagi LJK, LJK lainnya, dan entitas lainnya Tahun 2024	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (LJK Lainnya), dan Entitas Lainnya
42	07 Agustus 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Pajak Bertutur 2024	SMP Negeri 1 Malang	65 Siswa Siswi SMP N 1 Malang
43	27 Agustus 2024	Kegiatan Tidak Langsung 1 Arah (Siniar)	Podcast "Bakso Malang": RAPBN 2025 dan Perpajakan 2025	Pojok Kemenkeu Universitas Brawijaya	Balai Diklat Keuangan, Komunitas #Uangkita (Komunita)

					Regional Malang, mahasiswa
44	19 Agustus 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
45	20 Agustus 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
46	21 Agustus 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
47	22 Agustus 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
48	26 Agustus 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
49	27 Agustus 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Kebijakan perpajakan sebagai implementasi spin off bagi Koperasi	Harris Hotel and Convention Malang	Rapat Koordinasi Kebijakan Kelembagaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur
50	02 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
51	03 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
52	03 September 2024	Kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak	Koordinasi dan Sharing Session Inklusi	melalui Zoom Meeting	Dosen Universitas

53	03 September 2024	Kegiatan Inklusi Kesadaran Pajak	Bimbingan Teknis Inklusi	melalui Zoom Meeting	Panca Marga Probolinggo
54	04 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
55	05 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
56	17 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
57	18 September 2024	Edukasi kepada WP Badan PKP	Kegiatan Edukasi Coretax Tahap I Kepada Wajib Pajak Terpilih	Aula Kanwil DJP Jatim III	Wajib Pajak PKP Kanwil DJP Jatim III
58	24 September 2024	Edukasi kepada WP Bendahara dan OP Non PKP	Sosialisasi Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) kepada Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD se-Kanwil DJP Jawa Timur III	Aula Kanwil DJP Jatim III	Sekretaris DPRD dan Kepala BPKAD se-Kanwil DJP Jawa Timur III
59	27 September 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	IG Live : Mengabdikan pada Negeri lewat RENJANI	Instagram Live	follower @pajakjatim3
60	01 Oktober 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Sosialisasi Perpajakan bagi Dokter di Rumah Sakit Lavalette	Ruang Rapat Utama (RRU) Rumah Sakit Lavalette Malang	Dokter di Rumah Sakit Lavalette
61	03 Oktober 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Kunjungan Tax Center UIN Malang ke Kanwil III DJP Jawa Timur	Lobby Kanwil DJP Jatim III	Pengurus Tax Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

62	14 Oktober 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Sosialisasi Pemberlakuan TER dalam Pemotongan PPh 21 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Ruang Rapat Paripurna DPRD Lt.3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang
63	25 Oktober 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Company Visit Kementerian Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya 2024	Lobby Kanwil DJP Jatim III	mahasiswa Universitas Brawijaya
64	29 Oktober 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Profesi Akuntan dalam Perpajakan	Gedung RnD Lt. 6, Universitas Ma Chung	Kelas Profesi Akuntansi
65	30 Oktober 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Edukasi perpajakan kepada anggota Apindo Kota dan Kabupaten Malang	ATRIA HOTEL	anggota Apindo Kota dan Kabupaten Malang
66	05 November 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Relawan Pajak Batch VII: Stadium General Update Perpajakan	Gedung Pascasarjana UNISMA Lantai 7	Calon Relawan Pajak Batch VII
67	06 November 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Bussiness Development Service 2024 KPP Pratama Malang Selatan: Strategi Grow Up, UMKM Glow Up!	Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang (KPPN)	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di lingkungan KPP Pratama Malang Selatan
68	07 November 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Seminar Nasional Tax Travaganza 2024	Via Zoom Meeting	mahasiswa/i Program Studi Akuntansi perguruan

					tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia
69	19 November 2024	Kegiatan Edukasi Dua Arah (Instagram Live)	IG Live: Coretax, Cari Tahu dengan Jarimu!	Lobby Kanwil DJP Jatim III	follower @pajakjatim3
70	20 November 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Sosialisasi tentang Coretax System	Aula Kanwil DJP Jatim III	anggota IKPI Cabang Malang
71	26 November 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Edukasi Aplikasi Coretax	Aula Kanwil DJP Jatim III	INI IPPAT Malang Raya
72	03 Desember 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Forum Tax Center dan Edukasi Coretax	Aula Kanwil DJP Jatim III	TC (Dosen)
73	05 Desember 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	BDS Pajak Berisyarat	Aula Kanwil DJP Jatim III	UMKM Disabilitas ber-NPWP
74	16 Desember 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak (Relawan Pajak)	Pengukuhan Relawan Pajak	Aula Kanwil DJP Jatim III	TC (Relawan Pajak)
75	18 Desember 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak	Solusi Pajak Digital untuk Generasi Milenial dan Gen Z: Memanfaatkan Coretax dengan cerdas	Online (Zoom meeting)	Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Marga Probolinggo
76	18 Desember 2024	Edukasi kepada Calon Wajib Pajak (Relawan Pajak)	Pengukuhan Relawan Pajak Batch VII: Kebijakan Tarif PPN 12%: Langkah Strategis Menuju Keadilan Pajak	Gedung Utsman bin Affan, Lt. 7 Gedung B Universitas Islam Malang	Relawan Pajak Batch VII Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis

					Universitas Islam Malang
77	19 Desember 2024	Edukasi kepada WP OP Non PKP	Edukasi Aplikasi Coretax ke Instansi Pemerintah	Aula Kanwil DJP Jatim III	30 Bendahara Instansi Pemerintah

14. Melakukan publikasi terkait perpajakan yang meliputi:

a. Kegiatan publikasi di situs web DJP

Nama	Artikel	Berita	Flash Foto	Siaran Pers	Publish Pajak.go.id Total
Kanwil DJP Jawa Timur III	4	0	191	9	204

b. Kegiatan publikasi media sosial dan lainnya

No.	Judul
1	Kegiatan Publikasi Reels Terima Kasih Kawan Pajak
2	Kegiatan Publikasi Grafis Hattrick Penerimaan Pajak
3	Kegiatan Publikasi Reels Padankan Saja
4	Kegiatan Publikasi Grafis Hari Bakti Perbendaharaan
5	Kegiatan Publikasi Foto Kapolda Jadi Relawan Pajak
6	Kegiatan Publikasi Reels Bang Tanya Dong NSFP
7	Kegiatan Publikasi Reels Januari Siap Laporan
8	Kegiatan Publikasi Foto Puas Pelayanan
9	Kegiatan Publikasi Reels Jangan Telat
10	Kegiatan Publikasi Foto Pelatihan Relawan Pajak Unisma
11	Kegiatan Publikasi Reels Hey Kids This Is Your Mom
12	Kegiatan Publikasi Reels Lupa EFIN
13	Kegiatan Publikasi Reels Tahukah Kamu
14	Kegiatan Publikasi Grafis Instagram Live Ada Yang Baru Nih TER PPh 21
15	Kegiatan Publikasi Grafis Kalkulator Pajak
16	Kegiatan Publikasi Instagram Live Ada Yang Baru Nih TER PPh 21
17	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi PMK 136 Tahun 2023
18	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER PPh Pasal 21 & Pemadanan NIK-NPWP
19	Kegiatan Publikasi Reels Apresiasi Menkeu
20	Kegiatan Publikasi Reels Misi Mau Lewat

21	Kegiatan Publikasi Foto Bantu Kami jadi Lebih Baik
22	Kegiatan Publikasi Grafis TER Bukan Jenis Pajak Baru
23	Kegiatan Publikasi Reels Ngobrol Pajak Bareng Inul
24	Kegiatan Publikasi Reels Lupa EFIN
25	Kegiatan Publikasi Grafis Saluran Laporan SPT
26	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi User Requirement dan User Experience
27	Kegiatan Publikasi Foto Isra Mikraj
28	Kegiatan Publikasi Foto Selamat Hari Raya Imlek
29	Kegiatan Publikasi Foto Kejari Kab. Malang Tahan Tersangka Pidana Pajak
30	Kegiatan Publikasi Grafis Instagram Live TER, Apa Nih?
31	Kegiatan Publikasi Reels Peh! Yo Lapor SPT Tahunan No..
32	Kegiatan Publikasi Grafis Fasilitas PPN DTP Rumah Diperpanjang
33	Kegiatan Publikasi Grafis Publikasi Laporan Kinerja Kanwil DJP Jawa Timur III
34	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Aspek Perpajakan Pasar Modal
35	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi PP58/2023 PMK 168/2023 APINDO, PHRI & Kadin Kota Batu
36	Kegiatan Publikasi Foto Sit In Inklusi Pajak Mapel IPS SMPN 9 Malang
37	Kegiatan Publikasi Foto Sit In Inklusi Pajak Mapel IPA SMPN 9 Malang
38	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER PPh 21 & CORETAX System INI Pengda Malang Raya
39	Kegiatan Publikasi Reels Rahajeng Rahina Nyepi
40	Kegiatan Publikasi Grafis Waktu Pelayanan Ramadan 1445 H/2024
41	Kegiatan Publikasi Grafis Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan
42	Kegiatan Publikasi Grafis Awas Penipu
43	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER PPh21 PMK 168/2023 GAPEROMA
44	Kegiatan Publikasi Foto FGD Relevansi Lulusan Akuntan dengan Dunia Usaha
45	Kegiatan Publikasi Foto Podcast Bincang Pajak SPT Tahunan KB Kolaborasi dengan TC FEB UB
46	Kegiatan Publikasi Foto Webinar TER PPh Pasal 21 dan Coretax System Kolaborasi BDK Malang
47	Kegiatan Publikasi Grafis Dukung Kami ZI WBK
48	Kegiatan Publikasi Reels Pojok Pajak MOG
49	Kegiatan Publikasi Foto Rangkaian Sit In Inklusi Pajak Tingkat SMP Negeri di Kota Malang
50	Kegiatan Publikasi Grafis Pojok Pajak MOG
51	Kegiatan Publikasi Grafis Radio Talkshow Gak Lapor Pajak, Rugi Dong

52	Kegiatan Publikasi Reels Lapor Pajak
53	Kegiatan Publikasi Grafis Instagram Live Lapor SPT Kita Bikin Romantis
54	Kegiatan Publikasi Foto Masih Bingung Lapor SPT Tahunan?
55	Kegiatan Publikasi Reels Waspada Penipuan
56	Kegiatan Publikasi Reels Lapor Pajak Saiki Mboisss Keeeeer!
57	Kegiatan Publikasi Grafis Daftar Saluran Lupa EFIN
58	Kegiatan Publikasi Grafis Kelas Pajak Coretax, NIK-NPWP, SPT Tahunan OP
59	Kegiatan Publikasi Foto Taat Pajak Wujud Bela Negara Pangdam V/Brawijaya
60	Kegiatan Publikasi Foto Pimpinan Kemenkeu Jawa Timur Kunjungi Pangdam Bahas Apa?
61	Kegiatan Publikasi Grafis Ayo Segera Lapor SPT Tahunan
62	Kegiatan Publikasi Reels Sahur SPT
63	Kegiatan Publikasi Grafis Tolak & Laporkan Gratifikasi
64	Kegiatan Publikasi Reels Lapor SPT Cepat & Gak Ribet
65	Kegiatan Publikasi Reels SPT REK!
66	Kegiatan Publikasi Reels Jumat Agung
67	Kegiatan Publikasi Grafis Kantor Pajak Sabtu Minggu Tetap Buka
68	Kegiatan Publikasi Reels Lapor SPT Flexing BPE
69	Kegiatan Publikasi Foto Jangan Lupa Hari Terakhir Lapot SPT Tahunan
70	Kegiatan Publikasi Foto Jelang Batas Akhir Pelaporan SPT WP OP, Kantor Pajak Tetap Buka
71	Kegiatan Publikasi Reels Selamat Ulang Tahun Kota Malang
72	Kegiatan Publikasi Foto Terima Kasih Wajib Pajak
73	Kegiatan Publikasi Foto Audiensi Anggota Komisi XI DPR RI
74	Kegiatan Publikasi Foto Audiensi dengan Kanwil DJBC Jatim II
75	Kegiatan Publikasi Grafis Terima Kasih Kawan Pajak atas Penyampaian SPT Tahunan OP
76	Kegiatan Publikasi Reels Astaghfirullah Kok Belum Peadanan
77	Kegiatan Publikasi Foto Selamat Mudik
78	Kegiatan Publikasi Reels Selamat Hari Raya Idul Fitri
79	Kegiatan Publikasi Reels Kantor Pajak Buka Kembali
80	Kegiatan Publikasi Foto Inklusi Pajak Bahasa Inggris SPMN 6 Malang
81	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Kelembagaan Kenalkan Tusi DJP Kepada Calon Mahasiswa PKN STAN
82	Kegiatan Publikasi Foto Lomba Cipta Game
83	Kegiatan Publikasi Grafis Lomba Cipta Buku Digital Bergambar
84	Kegiatan Publikasi Foto Kemenkeu Jatim Dukung UMKM Jatim Naik Kelas Melalui Bazar Hingga Bimtek

85	Kegiatan Publikasi Sharing Session Inklusi ITB ASIA Malang Siap Sisipkan Kesadaran Pajak dalam Matkul Pancasila
86	Kegiatan Publikasi Foto Koordinasi PKS OP4D
87	Kegiatan Publikasi Grafis Pojok Pajak MOG
88	Kegiatan Publikasi Foto Press Conference APBN KITA
89	Kegiatan Publikasi Reels Belum Beromzet Tetap Lapor Pajak?
90	Kegiatan Publikasi Reels Perpanjang Saja
91	Kegiatan Publikasi Foto Imbas Bentuk PTN-BH Timbul Kewajiban Perpajakan Baru
92	Kegiatan Publikasi Foto Pegawai PTN-BH Dapat 2 Bukti Potong, SPT Tahunan Jadi Kurang Bayar
93	Kegiatan Publikasi Grafis Lebih Dari 14 Juta Sudah Lapor
94	Kegiatan Publikasi Grafis Penerimaan Pajak Rp393,91 T
95	Kegiatan Publikasi Foto Beli Rumah Harga Hingga Rp 5 Miliar Tidak Bayar PPN
96	Kegiatan Publikasi Foto NPWP Format Lama Hanya Digunakan Sampai 30 Juni 2024
97	Kegiatan Publikasi Foto DJP Bakal Luncurkan Coretax, Administrasi Pajak Jadi Lebih Mudah
98	Kegiatan Publikasi Reels QQOT Padankan NIK-NPWP
99	Kegiatan Publikasi Foto Batas Pelaporan SPT Tahunan Badan Usai, WP Bisa Ajukan Pembetulan SPT
100	Kegiatan Publikasi Foto SPT Tahunan Berstatus Lebih Bayar, Pilih Restitusi atau Pengembalian Pendahuluan?
101	Kegiatan Publikasi Foto Kemenkeu Jatim Bedah Peran Ekonomi Kab. Bojonegoro
102	Kegiatan Publikasi Reels Pemadanan Oyy!
103	Kegiatan Publikasi Foto DJP Kenalkan Portal Data Pihak Ketiga dan Interoperabilitas
104	Kegiatan Publikasi Grafis BDS: Belajar Jualan Pakai Live Tiktok
105	Kegiatan Publikasi Grafis Hasil Survei Nasional
106	Kegiatan Publikasi Grafis Instagram Live NIK-NPWP
107	Kegiatan Publikasi Reels Bayar Pajak Motor?
108	Kegiatan Publikasi Reels Butuh Nara Sumber dari DJP?
109	Kegiatan Publikasi Foto Penghitungan PPh 21 Menggunakan TER, Lebih Mudah dengan Kalkulator Pajak
110	Kegiatan Publikasi Foto Semua Layanan DJP Tidak Dipungut Biaya Apapun
111	Kegiatan Publikasi Reels Instagram Live NIK-NPWP
112	Kegiatan Publikasi Foto Siap-siap Kendaraan Mewah Bakal di Lelang Kemenkeu
113	Kegiatan Publikasi Grafis Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2568
114	Kegiatan Publikasi Grafis Yuk Ketahui Jenis-Jenis Lelang

115	Kegiatan Publikasi Foto Tak Steor PPN, S Dibui 2 Tahun
116	Kegiatan Publikasi Foto Tak Ajukan Diri sebagai PKP, EP Divonis Penjara
117	Kegiatan Publikasi Foto Kemenkeu Lelang Barang Hasil Penagihan Pajak
118	Kegiatan Publikasi Reels Layanan Pajak.go.id
119	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Kerja ke PIER
120	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Kerja ke Kusuma Agro Wisata Batu
121	Kegiatan Publikasi Foto Lelang Serentak Kemenkeu Jatim Ada Mercedes hingga Jeep Willys
122	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Kerja ke CV Surya Anugerah
123	Kegiatan Publikasi Foto Gen Z Sadar Pajak, Bekal Menuju Indonesia Emas 2045
124	Kegiatan Publikasi Foto Kemunculan Artificial Intelligence, Profesi Akuntan Terancam Punah?
125	Kegiatan Publikasi Foto Gelar BDS? DJP Borong UMKM Cuan denga Live Tiktok
126	Kegiatan Publikasi Foto Dorong UMKM Makin Berkembang, Omzet hingga Rp500 Jt Tidak Kena Pajak
127	Kegiatan Publikasi Foto Kemenkeu Jatim Lelang Puluhan Aset Total Nilai Limit Capai Rp14,9 Miliar
128	Kegiatan Publikasi Reels Peadanan Gampang Louww!
129	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungi DJP, Hiswana Migas Minta Kejelasan Pengenaan PPh dan PPN LPG 3 KG
130	Kegiatan Publikasi Foto Sinergi Cegah Korupsi, Instansi Pemerintah Jatim Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
131	Kegiatan Publikasi Reels Real or Fake
132	Kegiatan Publikasi Foto Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Dana Desa
133	Kegiatan Publikasi Foto Kolaborasi DJP Jatim III dengan Bank Mandiri Tingkatkan Kompetensi Pegawai DJP Lewat Seminar Commskill
134	Kegiatan Publikasi Reels Jangan Lupa Padankan NIK-NPWP
135	Kegiatan Publikasi Reels 3 Hari Lagi Batas Waktu Peadanan NIK-NPWP
136	Kegiatan Publikasi Reels Pajak Untuk Pendidikan Renjani
137	Kegiatan Publikasi Reels Peadanan NIK-NPWP Sekarang Juga
138	Kegiatan Publikasi Reels Waspada penipuan
139	Kegiatan Publikasi Foto Ekonomi Tumbuh Apa Dampaknya?
140	Kegiatan Publikasi Reels Kartu NPWP Rusak
141	Kegiatan Publikasi Foto Live Instagram
142	Kegiatan Publikasi Foto Update Penerimaan Pajak
143	Kegiatan Publikasi Foto Apresiasi Wajib Pajak

144	Kegiatan Publikasi Foto Edukasi dan Uji Coba Coretax
145	Kegiatan Publikasi Foto Peringatan Maulid Nabi
146	Kegiatan Publikasi Reels Survei DJP
147	Kegiatan Publikasi Reels Tutorial Bupot
148	Kegiatan Publikasi Reels Challenge TER'
149	Kegiatan Publikasi Foto Pendaftaran Relawan Pajak
150	Kegiatan Publikasi Foto Batas Waktu Tarif UMKM
151	Kegiatan Publikasi Foto Update Penerimaan Pajak
152	Kegiatan Publikasi Foto Survei DJP
153	Kegiatan Publikasi Foto Hari Jadi Bondowoso
154	Kegiatan Publikasi Foto Dirgahayu Indonesia
155	Kegiatan Publikasi Reels UMKM Tumbuh
156	Kegiatan Publikasi Foto UMKM Tumbuh
157	Kegiatan Publikasi Foto Hari Jadi Situbondo
158	Kegiatan Publikasi Foto Tax Center Uniwara
159	Kegiatan Publikasi Reels Pajak Bertutur
160	Kegiatan Publikasi Foto Edutax Award
161	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Bertutur
162	Kegiatan Publikasi Foto #UangKita Tulang Punggung Negara
163	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Bertutur
164	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Dana BOS
165	Kegiatan Publikasi Foto Pajak BumDesma
166	Kegiatan Publikasi Reels TaxLive
167	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Hibah dan Swakelola
168	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Kripto
169	Kegiatan Publikasi Foto Inklusi Universitas Panca Marga
170	Kegiatan Publikasi Foto Instagram Live
171	Kegiatan Publikasi Foto Pajak Digital
172	Kegiatan Publikasi Foto Tarif PPN
173	Kegiatan Publikasi Foto Reformasi Perpajakan
174	Kegiatan Publikasi Foto Tax Center UNU Pasuruan
175	Kegiatan Publikasi Reels Spextaxcular
176	Kegiatan Publikasi Foto Update Daftar Layanan
177	Kegiatan Publikasi Reels Spextaxcular
178	Kegiatan Publikasi Foto Spextaxcular

179	Kegiatan Publikasi Reels DJP Peduli
180	Kegiatan Publikasi Reels Spextaxcular
181	Kegiatan Publikasi Reels Tax Center IAD Probolinggo
182	Kegiatan Publikasi Reels Spextaxcular
183	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Pemda Blitar
184	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan STIE Nganjuk
185	Kegiatan Publikasi Reels Excel Clash
186	Kegiatan Publikasi Foto DJP Peduli
187	Kegiatan Publikasi Foto Spextaxcular
188	Kegiatan Publikasi Foto Peringatan Tahun Baru Islam
189	Kegiatan Publikasi Reels Waspada penipuan
190	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Indofood
191	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Sorini
192	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Aneka Tuna
193	Kegiatan Publikasi Foto Tolak Gratifikasi
194	Kegiatan Publikasi Foto NIK NPWP
195	Kegiatan Publikasi Foto Update Penerimaan Pajak
196	Kegiatan Publikasi Foto Peresmian Bandara Dhoho
197	Kegiatan Publikasi Grafis Lelang Serentak Kemenkeu Jatim
198	Kegiatan Publikasi Foto DJP Luncurkan Simulasi Coretax
199	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER BPKAD
200	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER DPRD Provinsi
201	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER DPRD Kota Malang
202	Kegiatan Publikasi Grafis Waspada Penipuan
203	Kegiatan Publikasi Foto Diseminasi Penyampain Data Regional
204	Kegiatan Publikasi Reels e-Meterai
205	Kegiatan Publikasi Foto Peresmian Bandara Dhoho
206	Kegiatan Publikasi Foto Pengadilan Pajak Gugatan PT Arion
207	Kegiatan Publikasi Reels Pematangan NIK-NPWP
208	Kegiatan Publikasi Grafis PHTB
209	Kegiatan Publikasi Reels BPHTB
210	Kegiatan Publikasi Reels Apatuh Coretax
211	Kegiatan Publikasi Grafis Sumpah Pemuda
212	Kegiatan Publikasi Grafis Pengumuman Lelang Eksekusi
213	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Malang Selatan

214	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Kediri
215	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Tulungagung
216	Kegiatan Publikasi Foto Peringatan HORI
217	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Madya Malang
218	Kegiatan Publikasi Reels Laport SPT Tahunan
219	Kegiatan Publikasi Foto Kunjungan Vokasi UB
220	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Peluang Profesi Akuntansi ke UMC
221	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Situbondo
222	Kegiatan Publikasi Reels Pengumuman Lelang Pajak Kepanjen
223	Kegiatan Publikasi Grafis Kemudahan Layanan dan Prosedur Perpajakan
224	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Banyuwangi
225	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Coretax Apindo
226	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Singosari
227	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Jember
228	Kegiatan Publikasi Grafis Pemblokiran Nomor WA & Situs Web Penipuan
229	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi AEOI bagi LJK
230	Kegiatan Publikasi Foto Sinar AEOI di TribunJatim
231	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Batu
232	Kegiatan Publikasi Reels Lihat Coretax
233	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Relawan Pajak Unisma
234	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi TER Relawan Pajak Unisma
235	Kegiatan Publikasi Grafis Pengumuman Lelang Pajak Blitar
236	Kegiatan Publikasi Grafis Lelang Serentak Kemenkeu Jatim
237	Kegiatan Publikasi Grafis Hari Pahlawan
238	Kegiatan Publikasi Foto Upacara Peringatan Hari Pahlawan
239	Kegiatan Publikasi Reels Dua Pilihan Tarif PPh
240	Kegiatan Publikasi Reels BDS Pajak Malang Selatan
241	Kegiatan Publikasi Grafis Penerimaan Pajak s.d. Oktober
242	Kegiatan Publikasi Reels Testimoni BDS Pajak Malang Selatan
243	Kegiatan Publikasi Foto Lelang Serentak Kemenkeu Jatim
244	Kegiatan Publikasi Grafis IG Live Coretax
245	Kegiatan Publikasi Grafis Sosialisasi Coretax Pajak Batu
246	Kegiatan Publikasi Reels TGTS SMK Muhendo
247	Kegiatan Publikasi Grafis Idjen Talk PPN 12%
248	Kegiatan Publikasi Reels Coretax butuh NIK

249	Kegiatan Publikasi Foto Media Gathering
250	Kegiatan Publikasi Reels Selamat Hari Guru
251	Kegiatan Publikasi Foto Peresmian TPT Pajak Singosari
252	Kegiatan Publikasi Grafis Pengumuman Lelang Pajak Pasuruan
253	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Coretax INI IPPAT
254	Kegiatan Publikasi Reels UMKM Lama vs Baru
255	Kegiatan Publikasi Foto Sosialisasi Zakat kepada Baznas
256	Kegiatan Publikasi Reels Coretax itu Mudah
257	Kegiatan Publikasi Foto Podcast PPN 12% bersama BDK
258	Kegiatan Publikasi Reels Modus Penipuan
259	Kegiatan Publikasi Reels Mengatasi KSWP Tidak Valid
260	Kegiatan Publikasi Foto Pengumuman Lelang Pajak Jember
261	Kegiatan Publikasi Grafis Pajak Kita untuk Masa Depan Mereka
262	Kegiatan Publikasi Foto DJP Mendukung Difabel Berkarya
263	Kegiatan Publikasi Foto Forum Tax Center
264	Kegiatan Publikasi Reels Kunjungan ke Bupati Malang
265	Kegiatan Publikasi Reels ZI WBK Kanwil DJP Jatim III
266	Kegiatan Publikasi Reels Pajak Pusat vs Pajak Daerah
267	Kegiatan Publikasi Grafis Selamat Hari Ibu
268	Kegiatan Publikasi Grafis Mengenal Belanja Perpajakan
269	Kegiatan Publikasi Grafis Hitung Sederhana PPN 12%
270	Kegiatan Publikasi Reels Belanja Asik Bebas PPN
271	Kegiatan Publikasi Grafis Tolak Gratifikasi Natal
272	Kegiatan Publikasi Grafis Selamat Natal
273	Kegiatan Publikasi Grafis Bayar Qris akan kena PPN
274	Kegiatan Publikasi Grafis Praimplementasi Coretax
275	Kegiatan Publikasi Reels Praimplementasi Coretax
276	Kegiatan Publikasi Foto Anggaran Kesehatan

c. Siaran Pers yang diterbitkan selama tahun 2024

Nomor SP	Tanggal	Judul Siaran Pers
SP-1	05 Januari 2024	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Capai Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
SP-2	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara

SP-3	16 Februari 2024	DJP Libatkan Wajib Pajak dalam Kembangkan Aplikasi eBupot 21/26
SP-4	16 Februari 2024	Rugikan Negara, Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan
SP-5	20 Februari 2024	Konferensi Pers APBN KITA Jawa Timur: Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp21,65 Triliun
SP-6	29 Maret 2024	Penerimaan Pajak Tembus Rp437,29 Miliar, KPP Blitar Beri Penghargaan Wajib Pajak
SP-7	20 Maret 2024	Implementasi Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Jawa Timur
SP-8	26 Maret 2024	Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Temui Pangdam VBrawijaya, Bahas Soal Coretax sampai Harga Beras
SP-9	26 April 2024	Sinergi Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur
SP-10	27 Mei 2024	Tak Setor PPN, Tersangka S Divonis 2 Tahun Penjara
SP-11	28 Mei 2024	Tak Laporkan untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, EP Dijatuhi Hukuman Penjara
SP-12	30 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Lelang Aset Sita, Ada Mercedes Hingga Jeep Willys
SP-13	14 Juni 2024	Penjelasan dan Klarifikasi atas Pemberitaan yang Menyangkut Proses Penagihan di Kantor Pajak Banyuwangi
SP-14	12 Juli 2024	Hari Pajak: DJP Jatim III Gelar E-Sports Olimpiade Excel
SP-15	13 Juli 2024	DJP Dorong Kesadaran Pajak Akademisi dengan Resmikan Dua Tax Center Baru di Jawa Timur
SP-16	16 Juli 2024	Rayakan Hari Pajak dengan Spectaxcular, DJP Harapkan Kebersamaan dengan Masyarakat
SP-17	08 Agustus 2024	Pajak Bertutur: DJP Apresiasi Suksesnya Piloting Inklusi Kesadaran Pajak di Kota Malang
SP-18	13 Agustus 2024	Permudah Layanan Perpajakan, DJP Resmikan Tax Center Baru
SP-19	19 September 2024	Undang Wajib Pajak Prominen, Kanwil DJP Jawa Timur III Soroti Tax Revenue Hingga CoreTax
SP-20	27 September 24	Perekonomian Jawa Timur Konsisten Tumbuh, Apa Dampaknya?
SP-21	10 Oktober 2024	Coretax Segera Rilis, DJP Luncurkan Aplikasi Simulator
SP-22	21 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion Indonesia, DJP Menang Mutlak
SP-23	21 November 24	Lima Menit untuk Tetap Update: Ketahui Strategi dan Isu Perpajakan Terkini
SP-24	12 Desember 2024	Kejar Target Pajak, Industri Rokok Jadi Tumpuan Kantor Pajak Kepanjen

d. Publikasi melalui media online

No	Penerbit	Tanggal	Judul
1	Pajak.com	01 Januari 2024	Layanan Perpajakan Bisa Diakses di MPP Probolinggo
2	Tugu Jatim	05 Januari 2024	Tax Center FEB Unisma Bekali Puluhan Relawan Pajak lewat Pelatihan: Mahir Teori hingga Praktik Sosialisasi
3	Antara News	05 Januari 2024	Penerimaan pajak DJP Jatim III capai Rp32,86 triliun pada 2023
4	RRI	05 Januari 2024	Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III Melebihi Target
5	Surya Kabar	05 Januari 2024	Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Lampau Target
6	Memorandum	05 Januari 2024	Kanwil DJP Jawa Timur III Capai Penerimaan Pajak Lebih dari 100%
7	Times Indonesia	06 Januari 2024	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Capai Penerimaan Pajak Lebih dari 100 Persen
8	Bisnis.com	06 Januari 2024	Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III Tembus Rp32,8 Triliun
9	DDTC News	12 Januari 2024	Tingkatkan Penerimaan Perpajakan, Kemenkeu Gandeng Polda Jawa Timur
10	Radar Sidoarjo	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara
11	Antara News	12 Januari 2024	Kemenkeu-Polda Jatim sinergi amankan penerimaan negara
12	Surya Kabar	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Polda Jatim Amankan Penerimaan Negara, Kapolda Jatim Dikukuhkan sebagai Relawan Pajak
13	Memorandum	12 Januari 2024	Kemenkeu Jatim Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara
14	RRI	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Polda Amankan Penerimaan Negara
15	Duta	12 Januari 2024	Tingkatkan Sinergi dan Penerimaan Negara, Kemenkeu Jatim Kunjungi Polda Jatim
16	Jawapes	12 Januari 2024	Sinergitas Lintas Sektor, Kemenkeu Jatim Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara
17	Ketik.co	12 Januari 2024	Kapolda Jatim Dikukuhkan sebagai Relawan Pajak

18	Surabaya Pagi	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
19	Sidoarjo Terkini	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Polda Jatim Amankan Penerimaan Negara
20	Redaksi Jatim	12 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara
21	Republik Jatim	13 Januari 2024	Dinobatkan Jadi Relawan Pajak, Kemenkeu Jatim Gandeng Kapolda Jatim Amankan Penerimaan Negara
22	Harian Disway	13 Januari 2024	Kemenkeu Beri Julukan Relawan Pajak Kepada Kapolda Jatim
23	Times Indonesia	13 Januari 2024	Kemenkeu Jawa Timur dan Polda Jatim Kolaborasi Amankan Penerimaan Negara
24	Metro 24 Sumut	02 Februari 2024	Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Diduga Paksa WP Akui Keuntungan yang Tidak Seharusnya
25	Pemkot Malang	06 Februari 2024	DJP Libatkan Wajib Pajak Kembangkan Aplikasi eBupot 21/26
26	Memorandum	06 Februari 2024	DJP Libatkan Wajib Pajak Kembangkan Aplikasi eBupot 21/26
27	Times Indonesia	06 Februari 2024	DJP Libatkan Wajib Pajak dalam Kembangkan Aplikasi eBupot 21/26
28	Pajak.com	07 Februari 2024	Wajib Pajak di Jatim Pelajari Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26
29	Bisnis.com	07 Februari 2024	DJP Libatkan Wajib Pajak Kembangkan Aplikasi eBupot
30	Seru.co.id	10 Februari 2024	DJP Tingkatkan Efektivitas Layanan WP Melalui User Requirement dan Experience eBupot
31	Times Indonesia	16 Februari 2024	Rugikan Negara, Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan
32	RRI	16 Februari 2024	Rugikan Negara Ratusan Juta, Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan
33	Bisnis.com	16 Februari 2024	Rugikan Negara Rp323,5 Juta, Tersangka Pidana Pajak Ditahan
34	Jatim Times	16 Februari 2024	Rugikan Negara, Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan

35	Memorandum	16 Februari 2024	Rugikan Negara, Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan
36	DDTC News	16 Februari 2024	Tak Laporkan SPT dan Setor Pajak, Wajib Pajak Terancam Dipenjara 6 Tahun
37	Diagram Kota	16 Februari 2024	PPNS Kanwil DJP Jatim III Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak ke Kejari Malang
38	Teras Jatim	16 Februari 2024	Tak Mau Setor PPN yang Dipungut Hingga Ratusan Juta, Pengusaha di Malang Dibui
39	Surya Kabar	26 Februari 2024	Ini Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur hingga Januari 2024
40	Times Indonesia	26 Februari 2024	Konferensi Pers APBN KITA Jawa Timur: Realisasi Pendapatan Negara Capai Rp21,65 Triliun
41	Nawacita Post	27 Februari 2024	ALCo Regional Jatim rilis Perkembangan Ekonomi Periode Januari 2024
42	IDX	28 Februari 2024	Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Perusahaan
43	Bisnis.com	28 Februari 2024	Penerimaan Negara di Provinsi Jatim Tembus Rp21,65 Triliun
44	Bisnis.com	28 Februari 2024	Penerimaan Pajak KPP Pratama Blitar Mencapai Rp437,29 Miliar
45	Times Indonesia	29 Februari 2024	Penerimaan Pajak Tembus Rp437,29 Miliar, KPP Blitar Beri Penghargaan Wajib Pajak
46	Times Indonesia	29 Februari 2024	100 Direktur Perusahaan Hadiri Sosialisasi Pasar Modal Terpadu oleh OJK, BEI, dan DJP
47	Malang Pagi	29 Februari 2024	Tingkatkan Perusahaan Go Public (IPO) OJK Malang Gelar SEPMT
48	RRI	29 Februari 2024	Ratusan Direktur Perusahaan Ikuti Sosialisasi Pasar Modal Terpadu di Malang
49	Surya Kabar	01 Maret 2024	100 Direktur Perusahaan Hadiri Sosialisasi Pasar Modal Terpadu dari OJK, BEI, dan Direktorat Jenderal Pajak
50	Surya Kabar	01 Maret 2024	Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, KPP Pratama Blitar Beri Penghargaan Wajib Pajak
51	Bisnis.com	01 Maret 2024	Perusahaan Didorong Manfaatkan Pasar Modal untuk Dapat Diskon Pajak

52	Blitar Kawentar	01 Maret 2024	Capaian Penerimaan Pajak Tembus Rp 437,29 M, KPP Pratama Blitar Beri Penghargaan Wajib Pajak
53	Konsultan Pajak Malang	01 Maret 2024	Penerimaan Pajak KPP Pratama Blitar Mencapai Rp437,29 Miliar
54	Jatim Times	02 Maret 2024	Penerimaan Pajak KPP Pratama Blitar Lampau Target: Sinergi Efektif Pemerintah dan Wajib Pajak
55	Pajak.com	04 Maret 2024	DJP Gandeng OJK dan BEI, Dorong Wajib Pajak Badan IPO
56	Times Indonesia	07 Maret 2024	Beri Panduan dan Pendampingan, Cara UIN Malang Buat Sivitas Akademika Taat Pajak
57	UIN Malang	07 Maret 2024	Upaya Tertib Pajak Ditingkatkan: Tax Center UIN Malang Berikan Pendampingan SPT Tahunan
58	UIN Malang	07 Maret 2024	Tax Center UIN Malang Berikan Pendampingan SPT Tahunan bagi Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
59	Pajak.com	08 Maret 2024	Tax Center UIN Malang Gelar Pendampingan Pelaporan SPT
60	Jatim Times	10 Maret 2024	Bangun Literasi Perpajakan, Unisba Blitar dan KPP Pratama Gelar Workshop
61	DDTC News	15 Maret 2024	Diberi Kesempatan 2 Tahun, Tersangka Pajak Akhirnya Ditahan di Kejari
62	Memorandum	26 Maret 2024	DJP Jatim Temui Pangdam V/ Brawijaya, Bahas Coretax hingga Harga Beras
63	Pajak.com	28 Maret 2024	3 Kanwil DJP Jatim Temui Pangdam V/Brawijaya, Bahas Implementasi "Core Tax"
64	Jatim Satu	29 Maret 2024	OJK Malang Support Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal SEPMT
65	Times Indonesia	01 April 2024	Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur Temui Pangdam V/Brawijaya, Bahas Soal Coretax sampai Harga Beras
66	Times Indonesia	01 April 2024	DPR RI Kunjungi Kanwil Pajak, Bahas Kondisi Ekonomi Jawa Timur
67	Times Indonesia	01 April 2024	DPR RI Kunjungi Kanwil Pajak, Bahas Kondisi Ekonomi Jawa Timur
68	DDTC	02 April 2024	DJP Sisipkan Pajak dalam Mapel IPA SMP, Ini Materi yang Disampaikan

69	Medius News	05 April 2024	Sengketa Gugatan Pajak, PT Arion Indonesia Menuntut Pembuktian LHP Dari DJP Jawa Timur III
70	Medius News	05 April 2024	Sengketa Pajak Antara PT Arion Indonesia Melawan DJP Mencari Keberadaan Hartini Sulistyaningsih Tim Pemeriksa DJP Jawa Timur III
71	Medius News	05 April 2024	PT Arion Indonesia Desak Keberanian Dirjen Pajak Berberkan Bukti Depan Majelis Hakim Soal SPHP
72	Medius News	06 April 2024	Kelanjutan Sidang Dugaan Pemalsuan LHP PT Arion Indonesia dengan Kanwil DJP Jatim III
73	Warta Niaga	06 April 2024	Kelanjutan Sidang Dugaan Pemalsuan LHP PT Arion Indonesia dengan Kanwil DJP Jatim III
74	Medius News	25 April 2024	Ahli Hukum Pajak Nilai DJP Langgar Kewenangan Terbitkan SPHP Wajib Pajak PT Arion Indonesia
75	Medius News	25 April 2024	Ahli Hukum Alessandro Rey Sebut DJP Pilih Pasal Favorit Saat Periksa PT Arion Indonesia
76	Radar Banyuwangi	26 April 2024	Sinergi Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur
77	Memorandum	26 April 2024	Kanwil DJPb Jatim Harap Perkembangan Ekonomi Terus Membaik
78	Pajak.com	26 April 2024	Kanwil DJP Jatim III Gandeng Pajak.com, Gemakan Edukasi Pajak Melalui Tulisan
79	RRI	26 April 2024	Realisasi dan Serapan APBN di Jatim Triwulan Pertama 2024 Tumbuh Positif
80	Telusur	26 April 2024	Sinergi Kebijakan Fiskal Pempus dan Pemda dalam Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jatim
81	Times Indonesia	26 April 2024	Jatim Konsisten Jadi Penyumbang Ekonomi Terbesar Kedua di Pulau Jawa
82	Times Indonesia	26 April 2024	Tahun Politik, Realisasi TKD dan Dana Insentif Fiskal di Jatim Melesat
83	Bisnis.com	26 April 2024	Ekonomi Jatim Diproyeksikan Tumbuh 5% pada Triwulan I/2024
84	Bisnis.com	27 April 2024	Penyaluran Kredit Program di Jatim Tembus Rp8,9 Triliun per Triwulan I/2024

85	Bisnis.com	27 April 2024	Penerimaan Cukai di DJBC Jatim II Diprediksi Shortfall Rp3 Triliun
86	JPNN	29 April 2024	DJP Diduga Punya Pasal Favorit untuk Menekan Wajib Pajak
87	JPNN	29 April 2024	Pakar Hukum Soroti Kasus Arion Indonesia Melawan DJP
88	Bisnis.com	29 April 2024	Penerimaan Pajak Regional Jawa Timur III Tembus Rp8,53 Triliun
89	Bisnis.com	29 April 2024	Piutang Negara di Jatim Terdata Rp1,5 Triliun
90	Medius News	29 April 2024	PT Arion Indonesia Gugat DJP: Diragukan Pengakuan Indonesia sebagai Negara Hukum
91	Msn	29 April 2024	Pakar Hukum Soroti Kasus Arion Indonesia Melawan DJP
92	Bicara Network	03 Mei 2024	Rekening Penunggak Pajak di Jawa Timur Diblokir Serentak
93	Sidoarjo Terkini	03 Mei 2024	DJP Jawa Timur Lakukan Blokir Serentak Rekening Penunggak Pajak
94	Antara News	03 Mei 2024	DJP Jatim blokir serentak rekening penunggak pajak
95	Tribunnews	03 Mei 2024	Kanwil DJP Jatim Blokir 1.182 Rekening, Sanksi Atas Tunggakan Kewajiban Bayar Pajak
96	RRI	03 Mei 2024	DJP Jawa Timur Lakukan Blokir Serentak Rekening Penunggak Pajak
97	Radar Surabaya	06 Mei 2024	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur Blokir 1.182 Rekening Penunggak Pajak, Siapa Saja Mereka?
98	Pajak.com	07 Mei 2024	Tiga Kanwil DJP Jatim Serentak Blokir Rekening Penunggak Pajak
99	DDTC News	13 Mei 2024	Kembangkan Taxpayer Account Management, DJP Jamin Kerahasiaan Data WP
100	DDTC News	13 Mei 2024	DJP Jamin Taxpayer Account Management Bakal Mudah Digunakan
101	Radar Malang	27 Mei 2024	Tak Setor PPN, Direktur di Kabupaten Malang Divonis 2 Tahun Penjara
102	Bisnis.com	27 Mei 2024	Wajib Pajak di Malang Dimasukkan ke Penjara, Buat Faktur Fiktif dan Tak Setor PPN

103	Times Indonesia	27 Mei 2024	Tak Setor PPN, Tersangka S Divonis 2 Tahun Penjara
104	Jatim Times	27 Mei 2024	Embat Pajak Pertambahan Nilai, Direktur CV Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara
105	RRI	28 Mei 2024	Tak Setor PPN, Direktur CV di Malang Divonis 2 Tahun Penjara
106	Times Indonesia	28 Mei 2024	Tak Laporan untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, EP Dijatuhi Hukuman Penjara
107	Suryani Suyanto Associates	28 Mei 2024	Pengusaha Rokok Dihukum Penjara Karena Tak Laporan Pajak
108	Bisnis.com	29 Mei 2024	Pengusaha Rokok Dihukum Penjara Karena Tak Laporan Pajak
109	MSN	29 Mei 2024	Pengusaha Rokok Dihukum Penjara Karena Tak Laporan Pajak
110	Times Indonesia	29 Mei 2024	Kepala Kanwil Pajak Malang Dorong Produktivitas Kawasan Industri Terbesar
111	Tribunnews	30 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Gelar Lelang Serentak Tahap I, Ada Aset dari Eksekusi dan non Eksekusi
112	Sidoarjo Terkini	30 Mei 2024	DJP Jawa Timur II Ikut Kegiatan Lelang Serentak Tahap I Kemenkeu Jatim dengan Aset Sitaan Senilai Rp 14 Milyar Lebih
113	Jawapes	30 Mei 2024	Sinergi Bersama untuk Indonesia Maju, DJP Jatim II Ikuti Giat Lelang Serentak Tahap I
114	Times Indonesia	30 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Lelang Aset Sita, Ada Mercedes Hingga Jeep Willys
115	RRI	30 Mei 2024	Kemenkeu Jawa Timur Lelang Aset Sitaan Rp 14 Milyar Lebih
116	Malang Post	30 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Gelar Lelang Serentak 80 Aset Hasil Sitaan
117	Abadi News	30 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Lakukan Lelang Serentak Tahap 1 2024
118	Pajak.com	30 Mei 2024	Tak Laporan untuk Dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak, Pelaku Ini Dipenjara

119	MSn	31 Mei 2024	Aset Sita Kemenkeu Jatim senilai Rp14,9 Miliar Dilelang
120	Memorandum	31 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Lelang Hasil Penyitaan Aset, Ada Mercedes Hingga Motor BSA
121	Bidik News	31 Mei 2024	Kemenkeu Satu Jatim Lelang Aset Sitaan Penunggak Pajak Senilai Rp14 M
122	Bisnis.com	31 Mei 2024	Aset Sita Kemenkeu Jatim senilai Rp14,9 Miliar Dilelang
123	Suara Bojonegoro	31 Mei 2024	Lelang Serentak Aset Sitaan Rp 14 Miliar Lebih Yang Digelar Kemenkeu Jatim I Diikuti Kanwil DJP Jatim II
124	Memorandum	31 Mei 2024	Kemenkeu Jatim Lelang Hasil Penyitaan Aset, Ada Mercedes Hingga Motor BSA
125	Pajak.com	31 Mei 2024	Kemenkeu Satu Jatim Lelang Serentak Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 14,88 M
126	Ahbi	01 Juni 2024	Kemenkeu Satu Jawa Timur Mengadakan Lelang Serentak
127	RRI	02 Juni 2024	Sistem Perpajakan Bakal Menggunakan Coretax Sistem
128	DDTC	02 Juni 2024	Pengusaha Rokok Tidak PKP, Pengadilan Jatuhkan Vonis Penjara 1,5 Tahun
129	DDTC	03 Juni 2024	Gara-Gara Tak Setor PPN, Direktur CV Ini Terancam Masuk Bui 2 Tahun
130	Times Indonesia	10 Juni 2024	DJP Dorong 300 UMKM Malang Cuan dengan Live Tiktok
131	Detik	12 Juni 2024	Rekening Diblokir Kantor Pajak, Warga Banyuwangi Tuntut Penjelasan
132	Detik	14 Juni 2024	Kantor Pajak Banyuwangi Buka Suara soal Blokir Rekening Warga
133	Tribunnews	16 Juni 2024	Penjual Elpiji 3 Kg Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Disodori Surat Tapi Tak Boleh Dibaca, DJP: Peraturan
134	Tribunnews	16 Juni 2024	Reaksi Syok Penjual Elpiji 3 Kg di Banyuwangi Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Rekening Mendadak Diblokir
135	Tribunnews	17 Juni 2024	Alasan Bambang Penjual Elpiji 3 Kg Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Bingung Merasa Sudah Bayar: Demi Allah
136	Tribunnews	17 Juni 2024	Curhat Penjual Elpiji 3 Kg Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Kaget Rekening Diblokir, DJP Beber Klarifikasi

137	Tribunnews	17 Juni 2024	JATIM TERPOPULER: Penjual Elpiji 3 Kg Ditagih Pajak Rp 200 Juta hingga Muatan Pakan Burung Terbakar
138	Tribunnews	18 Juni 2024	Viral Tagihan Pajak Penjual Elpiji Rp 200 Juta, Kelakuan Petugas Pajak Janggal, Tak Boleh Baca Surat
139	Berita Satu	18 Juni 2024	Heboh! Penjual Elpiji 3 Kg di Banyuwangi Kebingungan Setelah Rekening Diblokir dan Ditagih Pajak Rp200 Juta, Begini Kronologinya
140	Tribunnews	18 Juni 2024	Bingung Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Penjual Elpiji di Banyuwangi Merasa Janggal: Pak Jokowi, Tolong
141	Era Baru Media	18 Juni 2024	Waduh Tagihan Pajak Penjual Elpiji di Banyuwangi Rp200 Juta, Rekening Bank Diblokir, Pernah Dapat Penghargaan
142	Teras Info	18 Juni 2024	Pengusaha Elpiji 3 Kg Banyuwangi Syok! Rekening Dibekukan karena Utang Pajak 200 Juta, DJP Angkat Bicara
143	Tribunnews	18 Juni 2024	CURHAT Penjual Elpiji 3 Kg Ditagih Pajak Rp 200 Juta, Surat tak Boleh Dibaca, Kini Rekening Diblokir
144	Gema Sulawesi	18 Juni 2024	Heboh! Penjual Elpiji 3 Kg di Banyuwangi Kebingungan Setelah Rekening Diblokir dan Ditagih Pajak Rp200 Juta, Begini Kronologinya
145	Tugu Satu	12 Juli 2024	Peringati Hari Pajak, DJP Jatim III Gelar E-Sports Olimpiade Excel
146	Pajak.com	12 Juli 2024	Peringati Hari Pajak, Kanwil DJP Jatim III Gelar E-Sports Olimpiade Excel
147	UNU Pasuruan	12 Juli 2024	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Launching Kantor pelayanan Tax Center DJP Jawa Timur III di UNU Pasuruan
148	RRI	13 Juli 2024	Resmikan 2 Tax Center Baru, DJP Jatim III Dorong Kesadaran Pajak Akademisi
149	Surabaya Bisnis	13 Juli 2024	DJP Resmikan Dua Tax Center Baru di Jawa Timur
150	RRI	13 Juli 2024	Hari Pajak, DJP Jatim III Gelar E-Sports Olimpiade Excel
151	Memorandum	14 Juli 2024	Resmikan Dua Tax Center, DJP Jatim III Dorong Kesadaran Pajak Akademis

152	Memorandum	14 Juli 2024	Peringati Hari Pajak, DJP Jatim III Gelar E-Sports Olimpiade Excel
153	RRI	14 Juli 2024	Kanwil DJP Jatim III Gelar Kampanye 'Spectaxcular 2024'
154	Memorandum	14 Juli 2024	Resmikan Dua Tax Center, DJP Jatim III Dorong Kesadaran Pajak Akademisi
155	Times Indonesia	14 Juli 2024	Permudah Layanan Perpajakan, DJP Jatim III Resmikan Tax Center Baru
156	RRI	14 Juli 2024	Permudah Layanan Perpajakan, DJP Jatim III Resmikan Tax Center Baru
157	Times Indonesia	15 Juli 2024	DJP Dorong Kesadaran Pajak Akademisi dengan Resmikan Dua Tax Center Baru di Jawa Timur
158	Times Indonesia	15 Juli 2024	Rayakan Hari Pajak dengan Spectaxcular, DJP Harapkan Kebersamaan dengan Masyarakat
159	Radar Malang	15 Juli 2024	Kanwil DJP Jawa Timur III Rayakan Hari Pajak dengan Spectaxcular di CFD Malan
160	Times Indonesia	15 Juli 2024	DJP Dorong Kesadaran Pajak Akademisi dengan Resmikan Dua Tax Center Baru di Jawa Timur
161	Pajak.com	16 Juli 2024	Kanwil DJP Jatim III Resmikan 2 "Tax Center" Baru sebagai Pusat Edukasi dan Pelayanan Perpajakan
162	Pajak.com	09 Agustus 2024	Pajak Bertutur 2024: DJP Apresiasi "Piloting" Inklusi Kesadaran Pajak di Kota Malang
163	Memorandum	10 Agustus 2024	Pajak Bertutur 2024, DJP Apresiasi Suksesnya Piloting Inklusi Kesadaran Pajak di Kota Malang
164	Bisnis.com	14 Agustus 2024	Permudah Layanan Perpajakan, DJP Resmikan Tax Center Baru
165	Times Indonesia	15 Agustus 2024	Permudah Layanan Perpajakan, DJP Resmikan Tax Center Baru
166	Times Indonesia	16 Agustus 2024	Dukung Ekonomi Lokal, DJP Sediakan Tempat UMKM Berjualan
167	RRI	23 Agustus 2024	DJP Jatim Sita Serentak Dengan Total Nilai Aset Rp 95 Milyar Lebih
168	Bisnis.com	20 September 2024	Petugas Pajak di Sekitar Pabrik Gudang Garam Cs Pungut Rp23,07 Triliun per Agustus 2024

169	MSN	20 September 2024	Petugas Pajak di Sekitar Pabrik Gudang Garam Cs Pungut Rp23,07 Triliun per Agustus 2024
170	Memorandum	20 September 2024	Undang Wajib Pajak Prominen, Kanwil DJP Jawa Timur III Soroti Tax Revenue Hingga CoreTax
171	Times Indonesia	20 September 2024	Undang Wajib Pajak Prominen, Kanwil DJP Jawa Timur III Soroti Tax Revenue Hingga Coretax
172	Times Indonesia	20 September 2024	Reformasi Perpajakan Masuki Tahap Uji Coba
173	Times Indonesia	20 September 2024	Tak Hanya Urusi Cagub, Parpol Juga Harus Paham Pajak
174	Pajak.com	21 September 2024	Kanwil DJP Jatim III Apresiasi dan Edukasi Penerapan "Core Tax" ke 40 Wajib Pajak Prominen
175	Times Indonesia	27 September 2024	Perekonomian Jawa Timur Konsisten Tumbuh, Apa Dampaknya?
176	Pajak.com	27 September 2024	Penerimaan Pajak 3 Kanwil DJP di Jatim Capai Rp 77,32 T per Agustus 2024
177	Antara News	02 Oktober 2024	Kanwil DJP Jawa Timur blokir 3.827 rekening penunggak pajak
178	Times Indonesia	03 Oktober 2024	Dibangun dengan Kolaborasi, Bandara Dhoho Siap Beroperasi
179	Radar Malang	09 Oktober 2024	Setahun, Kanwil DJP Jawa Timur III Ditarget Serap Pajak Rp 38 T
180	Times Indonesia	09 Oktober 2024	Penghitungan PPh Anggota DPRD Kini Gunakan Tarif Efektif
181	Times Indonesia	09 Oktober 2024	DJP dan Pemkot Probolinggo Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pajak
182	Times Indonesia	10 Oktober 2024	Coretax Segera Rilis, DJP Luncurkan Aplikasi Simulator
183	Sanyang Tax Consultants	11 Oktober 2024	Kanwil DJP Jatim III Kenalkan Kemudahan "Core Tax" ke Wajib Pajak
184	Pajak.com	11 Oktober 2024	Kanwil DJP Jatim III Kenalkan Kemudahan "Core Tax" ke Wajib Pajak
185	Detik	14 Oktober 2024	Sumbang Pajak Besar, BSI Raih Penghargaan dari DJP Jatim III

186	Kabar Jawa Timur	14 Oktober 2024	Lagi! DJP Pajak Berikan Penghargaan Operator Tambang PT BSI, Ini Prestasinya
187	Bisnis.com	22 Oktober 2024	Sengketa Pemeriksaan Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion atas DJP
188	Times Indonesia	22 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion, DJP Menang Mutlak
189	Memorandum	22 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion, DJP Menang Mutlak
190	Tribunnews	22 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion, DJP Menang Mutlak
191	Times Indonesia	23 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion Indonesia, DJP Menang Mutlak
192	Times Indonesia	23 Oktober 2024	DJP Lumajang Ingatkan Kewajiban Status PKP Pengusaha Real Estate
193	Times Indonesia	25 Oktober 2024	Pajak Probolinggo Kerja Sama dengan Kejaksaan, Tindak Wajib Pajak Nakal
194	Times Indonesia	25 Oktober 2024	Pemerintah Beri Insentif Pajak Sampai untuk Pembelian Properti
195	Pajak.com	27 Oktober 2024	Pengadilan Pajak Tolak Gugatan PT Arion Indonesia, Kanwil DJP Jatim III: Proses Pemeriksaan Sesuai Hukum Berlaku
196	Times Indonesia	01 November 2024	Coretax Dukung Integrasi Perpajakan Instansi Pemerintah
197	RRI	14 November 2024	Kemenkeu Satu Jatim Lelang Barang Sitaan Senilai Rp 12,99 Miliar Secara Serentak
198	Surya Kabar	14 November 2024	Optimalkan Penerimaan Negara, Kemenkeu Satu Jatim Lelang Barang Sitaan Senilai Rp 12,9 Miliar Secara Serentak
199	Surya Malang	14 November 2024	Aset Penunggak Pajak di Jatim Dilelang Serentak, Nilainya Mencapai Rp 12,99 Miliar
200	Lensa Nusantara	14 November 2024	Optimalisasi Penerimaan Negara, Kemenkeu Satu Jatim Gelar Lelang Barang Sitaan Senilai Rp12,99 Miliar
201	DDTC	15 November 2024	Sita 89 Aset Wajib Pajak, Kemenkeu Jawa Timur Adakan Lelang Serentak

202	Bisnis.com	15 November 2024	Ada Lelang Barang Sitaan Senilai Rp12,99 Miliar di Jawa Timur, Cek Daftarnya
203	Times Indonesia	15 November 2024	Kemenkeu Jatim Lelang Aset Wajib Pajak Rp12,9 Miliar
204	Pajak.com	17 November 2024	Tak Setor PPN, Pengusaha Kontraktor di Jatim Dipenjara
205	malangkotagoid	21 November 2024	DJP Jatim III Beberkan Isu Perpajakan Terkini
206	Harian Bhirawa	21 November 2024	Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III Per Oktober 2024 Capai Rp28.7 Triliun
207	Memorandum	21 November 2024	DJP Jatim III Ungkap Strategi dan Komitmen Jaga Stabilitas Penerimaan Negara
208	Surya Kabar	21 November 2024	Kanwil DJP Jatim III Gelar Media Gathering, Bahas Reformasi dan Kolaborasi dengan Insan Media
209	RRI	21 November 2024	Kanwil DJP Jatim III Sebut Penerimaan Pajak Tumbuh Positif
210	Malang Post	21 November 2024	DJP Jatim III Implementasikan Sistem Perpajakan Lewat Coretax
211	Bisnis.com	22 November 2024	Realisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III Capai Rp28,73 Triliun
212	Radar Malang	22 November 2024	Tidak Semuanya Kena PPN 12 Persen, Ini Daftar Barang yang Bebas dari Pajak Pertambahan Nilai, Begini Penjelasan Dirjen Pajak di M
213	Pajak.com	24 November 2024	Penerimaan Pajak 73,94 Persen dari Target, Kanwil DJP Jatim III: Terjadi Tren Penurunan PPh Badan
214	Memorandum	25 November 2024	Kanwil DJP Jawa Timur III Dorong Transformasi Digital dan Edukasi Pajak untuk Stabilitas Penerimaan
215	Times Indonesia	02 Desember 2024	Zakat Sebagai Pengurang Pajak, Bukan Beban Ganda
216	Times Indonesia	02 Desember 2024	PPN Naik, DJP Lindungi Masyarakat Kelas Menengah
217	Memorandum	05 Desember 2024	Kanwil DJP Jatim III Apresiasi Peran Media, Salah Satunya Memorandum

e. Publikasi media cetak

No	Tanggal	Nama Media	Judul
1	06 Januari 2024	Memorandum	Kanwil DJP Jatim III Capai Penerimaan Pajak Lebih dari 100 Persen
2	17 Februari 2024	Memorandum	Tersangka Tindak Pidana Pajak Ditahan
3	05 Maret 2024	Memorandum	Iklan Aku Pajak (gratis)
4	06 Maret 2024	Memorandum	Iklan Aku Pajak (gratis)
5	09 Maret 2024	Memorandum	Iklan Aku Pajak (gratis)
6	26 Maret 2024	Memorandum	DJP Jatim Temui Pangdam V/ Brawijaya, Bahas Coretax hingga Harga Beras
7	27 April 2024	Memorandum	Kanwil DJPb Jawa Timur Harap Perkembangan Ekonomi Terus Membaik
8	30 Mei 2024	Memorandum	DJP Jatim III Lakukan Penegakan Hukum, Dua Perkara Diajukan Ke Pengadilan Negeri
9	31 Mei 2024	Malang Post	Kemenkeu Jatim Gelar Lelang Serentak 80 Aset Hasil Sitaan
10	15 Juli 2024	Radar Malang	Kanwil DJP Jatim III Rayakan Pajak dengan Spectaxcular, Harapkan Kebersamaan Kian Erat dengan Masyarakat
11	09 Oktober 2024	Radar Malang	Setahun, Kanwil DJP III Ditarget Serap Pajak Rp38T

f. Melakukan perjanjian kerja sama dengan stakeholder

No.	Nomor PKS	Tanggal	Kegiatan
1	PRJ-6/WPJ.12/2024	11 Juli 2024	Kerja Sama Tax Center Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
2	PRJ-7/WPJ.12/2024	12 Juli 2024	Kerja Sama Tax Center Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan
3	PRJ-8/WPJ.12/2024	13 Agustus 2024	Perpanjangan Kerja Sama Tax Mal Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek
4	PRJ-9/WPJ.12/2024	13 Agustus 2024	Kerja Sama Tax Center Universitas PGRI Wiranegara
5	PRJ-10/WPJ.12/2024	28 Agustus 2024	Perpanjangan Kerja Sama Tax Center FEB Universitas Muhammadiyah Malang
6	PRJ-11/WPJ.12/2024	9 Agustus 2024	Perpanjangan Kerja Sama Tax Center Universitas Islam Malang
7	PRJ-12/WPJ.12/2024	17 September 2024	Perpanjangan Kerja Sama Tax Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
8	PRJ-13/WPJ.12/2024	25 November 2024	Perpanjangan Kerja Sama Tax Center ITS Mandala Jember

g. Publikasi melalui media luar ruangan

No	Jenis	Tanggal	Lokasi	Judul	Jumlah
1	X-Banner	Februari	Tax Center	SPT Tahunan	23
2	Flyer	Februari	Tax Center	NIK NPWP, SPT, Kewajiban perpajakan	6500
3	X-Banner	Juli	Tax Center IAD Probolinggo	NIK NPWP Kewajiban perpajakan	2
4	X-Banner	Juli	Tax Center IAD Probolinggo	Saluran Komunikasi, Pajak Kuat APBN Sehat	2
5	X-Banner	Juli	Tax Center UNU Pasuruan	NIK NPWP Kewajiban perpajakan	2
6	X-Banner	Juli	Tax Center UNU Pasuruan	Saluran Komunikasi, Pajak Kuat APBN Sehat	2
7	X-Banner	Agustus	Tax Center Uniwara	NIK NPWP Kewajiban perpajakan	2
8	X-Banner	Agustus	Tax Center Uniwara	Saluran Komunikasi, Pajak Kuat APBN Sehat	2
9	X-Banner	Agustus	Kanwil	UMKM	1
10	Videotron	30 Januari 2024	Videotron Block Office Balai Kota Malang	NIK NPWP dan SPT Tahunan	1
11	Konten Feed	7 Februari 2024	Instagram Pemkot Malang	SPT Tahunan	1
12	Videotron	16 Februari 2024	Videotron Block Office Balai Kota Malang	NIK NPWP dan SPT Tahunan	1
13	Konten Reels	20 Februari 2024	Instagram Pemkot Malang	SPT Tahunan	1

15. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pelayanan selama tahun 2024

No	Tanggal	Kegiatan
1	26 Maret 2024	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Triwulan I Tahun 2024
3	6 s.d 7 Juni 2024	Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Triwulan II Tahun 2024
5	15 s.d. 16 Agustus 2024	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Triwulan III Tahun 2024
7	27 Desember 2024	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2024

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III rutin melakukan monitoring dan evaluasi pada rapat triwulanan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk memantau kinerja, mendeteksi masalah atau hambatan yang muncul, dan membuat perbaikan yang diperlukan pada tiap-tiap triwulan. Agenda yang dibahas pada rapat triwulanan antara lain :

1. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penguatan Teladan Pimpinan terkait integritas dan pembinaan mental pegawai.
2. monitoring atas pencapaian penerimaan pajak baik ditingkat kanwil maupun masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III terhadap target yang diamanahkan.
3. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pegawai terhadap pelaksanaan tugas
4. realisasi pembangunan dan/atau keberlanjutan, monitoring dan evaluasi, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program ZI menuju WBK/WBBM
5. monitoring dan evaluasi atas penggunaan aplikasi teknologi informasi yang dipakai terkait inovasi-inovasi yang dimiliki
6. monitoring dan evaluasi atas kebijakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat
7. monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi terhadap perbaikan kinerja pegawai
8. monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat terkait pelayanan serta kode etik dan kode perilaku
9. pembahasan hasil survei kepuasan layanan masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mengulang kembali keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak yang diamanahkan sehingga berhasil menggapai pencapaian target diatas 100% untuk ke-lima kalinya (**Quintrick Penerimaan**). Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan strategi seluruh pihak dalam mencapai tugas dan fungsi yang diemban.

Capaian Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah sebesar 109,75% (seratus sembilan koma tujuh puluh lima). Sedangkan capaian penerimaan di tahun 2024 adalah 100,06% (seratus koma nol enam) dengan total penerimaan sebesar Rp36.072.369.092.334.000,00 (tiga puluh enam triliun tujuh puluh dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Selain itu, di tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III juga berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Kesuksesan realisasi penerimaan pajak ini merupakan buah dari kontribusi bersama seluruh unit kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Di samping mengejar target penerimaan pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III beserta seluruh unit dilingkungan wilayah kerja tetap berkomitmen penuh dalam mengukir prestasi di bidang lainnya. Tentunya menjadi sebuah harapan dan kebahagiaan apabila kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III di masa mendatang lebih baik lagi serta selalu dapat mencapai target penerimaan pajak yang diamanahkan.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para wajib pajak karena telah membantu pembangunan negara tercinta ini melalui kesadaran membayar pajak. Tak lupa kita haturkan rasa syukur dan doa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar senantiasa menyertai langkah kita menunaikan Amanah yang diberikan oleh negara dan rakyat Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Jawa Timur III di tahun 2025, Aamiin.

-- sekian dan terima kasih --